PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN

2025 - 2029



RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN TEGALOMBO
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2025-2029

KECAMATAN TEGALOMBO

TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang mencakup periode lima tahun. Renstra ini disusun sebagai bentuk operasionalisasi visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah, yang berisi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Kecamatan Tegalombo, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2029, dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Kecamatan Tegalombo mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Renstra Kecamatan Tegalombo Tahun 2025–2029 juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang menjadi dasar dalam pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkup Kecamatan Tegalombo. Dokumen ini akan memuat rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat tersebut. Proses penyusunannya dilakukan secara terkoordinasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait guna menjamin keterpaduan dan sinergi antar-perangkat daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam proses penyusunan Renstra ini. Besar harapan kami, dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi atas kinerja pelayanan, serta mendorong tercapainya pelayanan publik yang optimal sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalombo.

Pacitan, 19 September 2025
Plt. Camat Tegalombo
Kabupaten Pacitan

EDY WASANA, SE.
Pembina
NIP .19680505 198903 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR III
DAFTAR ISI IV
DAFTAR TABEL VI
DAFTAR GAMBAR VII
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Maksud dan Tujuan 7
1.4 Sistematika Penulisan 8
2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 12
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 12
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo 24
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 28
2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Tegalombo 40
2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 41
2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah 43
2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah 44
2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 44
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 44
2.2.2 Isu Strategis 47
3 BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 80
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah. 80
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah 87
4 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 94

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah.....94
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....112
BAB V PENUTUP.....115
5.1 Kesimpulan 115
5.2 Kaidah Pelaksanaan 115
5.3 Pengendalian dan Evaluasi 117

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Tegalombo Berdasarkan Pangkat.....24
Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Kecamatan Tegalombo 26
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 29
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 34
Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Tegalombo.....40
Tabel 2.6 Mitra Kecamatan Tegalombo 42
Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tegalombo.....45
Tabel 2.8 Perumusan Isu Kecamatan Tegalombo 73
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tegalombo 83
Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Tegalombo 87
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Tegalombo.....89
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo.....91
Tabel 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD 95
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2030.....105
Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 112
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tegalombo 113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan Tegalombo 2020-2024 30
Gambar 2.2 Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang: Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Kesejahteraan Sosial 31
Gambar 2.3 Persentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan 32
Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 84
Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 86

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB I
PENDAHULUAN



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) didefinisikan sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Kecamatan Tegalombo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Pacitan berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra ini kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra ini juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Kecamatan Tegalombo. Selain itu, Renstra berperan penting dalam menuntun Kecamatan Tegalombo sebagai Perangkat Daerah untuk berkonstribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan Pemerintah Kabupaten Pacitan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki.

Terdapat beberapa proses yang harus ditempuh dalam penyusunan Renstra ini, antara lain persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan Renstra, penyusunan Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra. Pada aspek substansi, dokumen Renstra Kecamatan Tegalombo memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain:

- RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029 sebagai acuan tujuan, sasaran, dan program pembangunan jangka menengah Kabupaten Pacitan;
- Renstra K/L sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan dari tingkat nasional;
- Renstra Provinsi Jawa Timur sebagai acuan pelaksanaan program pembangunan dari tingkat provinsi; dan
- Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pacitan sebagai acuan dalam melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup.

Adapun penyusunan dokumen Renstra Kecamatan Tegalombo sangat terkait dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan terpilih Tahun 2025–2029 dan RPJMD. Maka, untuk merealisasikan strategi pencapaian Visi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih yaitu "**Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA**", Kecamatan Tegalombo menitikberatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan pada misi yang keempat yaitu "*Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani*".

Renstra Kecamatan Tegalombo pada hakikatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran Kecamatan sendiri. Substansinya merupakan bentuk konkret dari apresiasi Kecamatan Tegalombo terhadap apa yang harus dilakukan agar proses perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dan selalu mengarah kepada upaya

menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan visi, misi Kepala Daerah Kepala Daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat Pacitan.

Renstra Kecamatan Tegalombo memiliki peran sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 2026-2030. Selain itu, Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Kecamatan Tegalombo.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan regulasi sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembar Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2024 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045;
25. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan.
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029.
27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Tegalombo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalombo;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Tegalombo untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalombo.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Kecamatan Tegalombo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Tegalombo dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan Tegalombo untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.

7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tegalombo yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat landasan konseptual dan normatif penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penjabaran dalam bab ini mencakup:

1.1 Latar Belakang;

1.2 Dasar Hukum;

1.3 Maksud dan Tujuan; dan

1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain:

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan

2.5 Mitra Perangkat Daerah Kecamatan dalam Pemberian Pelayanan

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan

2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah Kecamatan

2.8 Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;

BAB III: TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan beserta indikator kinerjanya serta rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan dalam lima tahun mendatang.

BAB IV: PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta rincian subkegiatan perangkat daerah yang mendukung program prioritas kepala daerah. Selain itu pada Bab ini disajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang melalui indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci. Kinerja ini akan diwujudkan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pacitan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan.

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Tegalombo merupakan perangkat daerah yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan. Kecamatan berperan penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayahnya.

Secara umum, jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Kantor Kecamatan Tegalombo meliputi:

1. **Pelayanan Administrasi Pemerintahan**
    - Penerbitan surat keterangan domisili, usaha, kependudukan tertentu (pengantar KTP, KK, akta kelahiran/kematian).
    - Legalisasi dokumen sesuai kewenangan.
    - Fasilitasi administrasi pemerintahan desa.
2. **Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan**
    - Rekomendasi dan surat pengantar terkait perizinan tertentu.
    - Fasilitasi perizinan usaha mikro dan kecil.
3. **Pelayanan Sosial Kemasyarakatan**
    - Fasilitasi bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
    - Dukungan koordinasi program kesehatan, pendidikan, serta kegiatan sosial budaya di wilayah kecamatan.
4. **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**
    - Koordinasi keamanan dan ketertiban wilayah bersama aparat terkait.

- Fasilitasi penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat.

5. **Pelayanan Pembangunan dan Ekonomi**
   - Pendampingan pelaksanaan pembangunan desa.
   - Fasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat dan UMKM.
6. **Pelayanan Lainnya**
   - Penyediaan informasi publik.
   - Dukungan terhadap pelaksanaan pemilu/pilkada.
   - Koordinasi kegiatan lintas sektor dengan perangkat daerah lainnya.

Dengan cakupan pelayanan tersebut, **Kantor Kecamatan Tegalombo** berperan sebagai pelayanan publik yang mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus menjadi pusat koordinasi pembangunan dan pemerintahan desa.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, maka Kecamatan Tegalombo mempunyai tugas meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Kecamatan dipimpin oleh Camat Kecamatan Tegalombo membawahi wilayah kerja sebagai berikut:

1. Desa Gedangan
2. Desa Gemaharjo
3. Desa Kasihan
4. Desa Kemuning
5. Desa Kebondalem
6. Desa Ngreco
7. Desa Ploso
8. Desa Pucangombo

9. Desa Tahunan
10. Desa Tahunan Baru
11. Desa Tegalombo

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Kecamatan Tegalombo yang dipimpin oleh Camat menyelenggarakan fungsi:

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
    1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan;
    2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah Kecamatan;
    3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
    4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban umum, meliputi;
    1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
    2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
    3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:

1. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
2. Selaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
   1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
   3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
   1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
   2. Efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
   3. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;

h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati.

Susunan Organisasi Kecamatan Tegalombo sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat;
b. Seksi Pelayanan Umum;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
e. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban; dan Kelurahan.

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Kecamatan

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif yang meliputi umum dan kepegawaian, keuangan, serta program, evaluasi dan pelaporan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok juga mempunyai fungsi:

a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan;
e. Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di lingkungan Kecamatan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi

Susunan Organisasi Kecamatan Tegalombo memiliki 4 (empat) Seksi, di antaranya Seksi Pelayanan Umum, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Selain itu, dalam susunan organisasi Kecamatan Tegalombo juga terdapat Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Adapun tugas pokok dan fungsi susunan organisasi tersebut adalah:

1. **Seksi Pelayanan Umum**

   Seksi Pelayanan Umum berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, yang kemudian dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pelayanan umum. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

   a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
   b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan;
   c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat desa/ kelurahan;
   d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain;
   e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
   f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahkan kepada camat yang bukan menjadi kewenangannya;
i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat, dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan tugas:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
b. Melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal;
c. Melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan;
d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan;
f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;

g. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
i. Memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antarkecamatan;
j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
k. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
l. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
m. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
n. Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
o. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
p. Memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
q. Menyusun rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
r. Memfasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan tugas:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
b. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
c. Memfasilitasi kerja sama antardesa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
d. Memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
e. Mengkoordinir pendampingan desa di wilayahnya;
f. Mengkoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan;
g. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan desa;
h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa;
i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
l. Melaksakan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan;
n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan desa dan/atau kelurahan;

o. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan/atau kelurahan;
p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa dan/atau kelurahan;
q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di desa dan/atau kelurahan;
r. Melaksanakan evaluasi desa dan/atau kelurahan;
s. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan;
t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
u. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
v. Memfasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyarakatan;
w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan dipimpin oleh Kepala Seksi. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas camat di bidang sosial, ketentraman dan ketertiban. Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan tugas:

a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;

b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;
c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
d. Menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;
j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
k. Melaksanakan urusan yang dilimpahalan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman keterliban dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan kepada camat melalui sekretaris kecamatan; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh camat.

Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Tegalombo sebagaimana Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kependudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Tegalombo
Sumber: Peraturan Bupati Pacitan No. 156 Tahun 2021

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo

Pelaksanaan fungsi Kecamatan harus dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, aset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Kemudian seiring dengan permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan pula sumber daya manusia yang kompeten dengan jumlah yang cukup dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan

Aktivitas pemerintahan Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Camat; Sekretariat; Seksi Pelayanan Umum; Seksi Pemerintahan; Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat; serta Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban. Adapun sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Tegalombo sebanyak 19 orang, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kecamatan Tegalombo Berdasarkan Pangkat

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	-
3	Pembina	IV/a	2
4	Penata Tk I	III/d	2
5	Penata	III/c	1
6	Penata Muda Tk I	III/b	-
7	Penata Muda	III/a	-
8	Pengatur Tk I	II/d	2
9	Pengatur	II/c	3
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	CPNS		1

No	Pangkat	Golongan	Jumlah (Orang)
12	PPPK		3
13	PTT & Non PTT selain PNS		5
JUMLAH			**19**

Sumber: Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, 2025

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kecamatan sebanyak 19 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian di bawah ini:

1. Magister S-2 : 1 Orang
2. Sarjana S-1 : 6 Orang
3. Diploma -3 : -
4. SLTA : 12 Orang
5. SLTP : -
6. SD : -

Dari data tersebut, terlihat bahwa sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang SLTA, yang mencerminkan **kesiapan** dalam ketrampilan berkomunikasi, ketrampilan kerja sama tim. Serta kemampuan membangun hubungan interpersonal yang positif. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penyusunan strategi peningkatan kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pengembangan karier berbasis kualifikasi dan kebutuhan organisasi.

Selanjutnya, distribusi usia pegawai juga menjadi aspek penting dalam analisis pengembangan sumber daya manusia. Komposisi usia memberikan gambaran mengenai keberlanjutan dan regenerasi aparatur, serta menjadi dasar dalam merancang strategi pengembangan SDM, seperti kaderisasi, alih pengetahuan, dan perencanaan kebutuhan pegawai di masa mendatang. Jumlah pegawai pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan dapat diperinci berdasarkan kelompok usia sebagai berikut:

1. Usia < 30 tahun : 5 Orang
2. Usia 30–39 tahun : 2 Orang

3. Usia 40–49 tahun : 3 Orang
4. Usia ≥ 50 tahun : 9 Orang

Berdasarkan data yang tersebut, terlihat bahwa kelompok usia di atas 50 tahun mendominasi komposisi pegawai saat ini. Analisis jabatan pada Kecamatan Tegalombo menunjukkan bahwa kebutuhan pegawai saat ini adalah 36 orang. Namun, kondisi aktual menunjukkan jumlah pegawai hanya sebanyak 19 orang, sehingga terdapat kekurangan sebanyak 17 orang. Hal ini mengindikasikan adanya kebutuhan regenerasi pegawai, yang menuntut perhatian khusus dalam perencanaan pensiun dan penggantiannya. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan strategis sumber daya manusia yang memperhatikan aspek demografi, agar kesinambungan pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan dapat terjaga secara berkelanjutan.

2.2.2 Kondisi Sarana Prasarana Kecamatan Tegalombo

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan Tegalombo sebagai sarana pendukung pelaksanaan fungsi organisasi dapat diperinci sebagai berikut.

Tabel 2.2 Jumlah Sarana Prasarana Kecamatan Tegalombo

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2		2
2	Tanah Lapangan Sepak Bola	1		1
3	Portable Generating Set	1	1	2
4	Station Wagon	1		1
5	Sepeda Motor	29	5	34
6	Gergaji Chain Saw	1		1
7	Mesin Fotocopy Folio	1		1
8	Lemari Kayu	1	1	2
9	Rak Kayu	6		6
10	Filing Cabinet Besi		3	3
11	Lemari Kaca	1		1
12	Lemari Makan	1		1
13	Mesin Absensi	1		1
14	LCD Projector/Infocus	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
15	Meja Kerja Kayu	13		13
16	Kursi Besi/Metal	3		3
17	Kursi Kayu	2		2
18	Meja Rapat	15	2	17
19	Tempat Tidur Kayu		2	2
20	Meja Resepsionis	3		3
21	Kursi Rapat	56		56
22	Kursi Tamu	1		1
23	Bangku Tunggu	1		1
24	Sofa	1		1
25	AC Split	1		1
26	Televisi	1		1
27	Wireless	1		1
28	Stabilisator	2		2
29	Dispenser		1	1
30	Mimbar/Podium		1	1
31	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1		1
32	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2		2
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon III		2	2
34	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	1		1
35	Audio Mixing Portable	1		1
36	Audio Amplifier	2		2
37	Professional Sound System	4		4
38	Camera Digital	1	3	4
39	Handy Cam		1	1
40	Handy Talky (HT)	2	1	3
41	Wireless Amplifier	1		1
42	P.C Unit	4	8	12
43	Laptop	3	1	4
44	Notebook	8	6	14
45	Serial Printer	4		4
46	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	2	12
47	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1		1
48	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	1		1
49	Access Point	1		1
50	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3		3
51	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	1		1

Sumber: Data Inventaris Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan data yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kecamatan

Tegalombo berada dalam kondisi **layak guna**. Namun masih ada beberapa aset yang mengalami kerusakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlu adanya langkah strategis berupa pemeliharaan aset yang masih layak**,** penghapusan aset tidak layak**,** serta pengadaan sarana baru secara bertahap guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal dalam lima tahun mendatang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

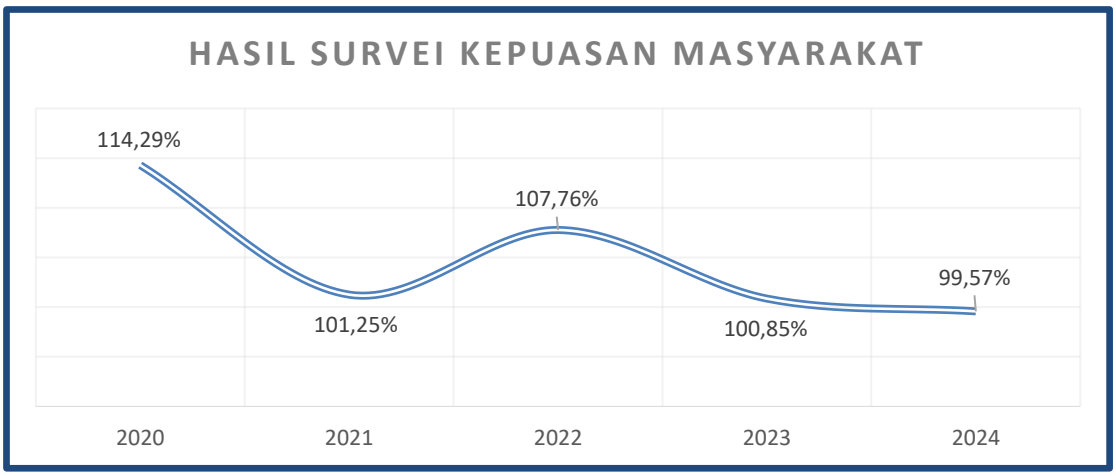
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Tegalombo telah menetapkan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat serta Seksi-Seksi terkait, dengan dukungan pendanaan melalui program dan kegiatan yang tersedia. Capaian kinerja Kecamatan Tegalombo disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

No	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Kinerja					Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Hasil Survey kepuasan Masyarakat	-	-	-	70	80	81,29	82,23	83,11	80	81	87,6	82,93	82,75	114,29%	101,25%	107,76%	100,85%	99,57%
2	Persentase rekomendasi hasil fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan sosial	-	-	-	79%	79,21%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	126,58%	126,25%	125,00%	125,00%	100,00%
3	Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: perencanaan, penganggaran dan pelaporan.	-	-	-	79%	79,21%	80%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	126,58%	126,25%	125,00%	125,00%	100,00%

Sumber: Data Capaian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 2020-2024.

Berdasarkan data capaian dan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo selama periode tahun 2020 hingga 2024, dapat diketahui bahwa kinerja pelayanan publik secara umum menunjukkan tren positif dan konsisten dalam mencapai maupun melampaui target yang telah ditetapkan. Tiga indikator utama yang digunakan dalam mengukur kinerja kecamatan tersebut adalah hasil survei kepuasan masyarakat, persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi fasilitasi dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum, serta persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan.

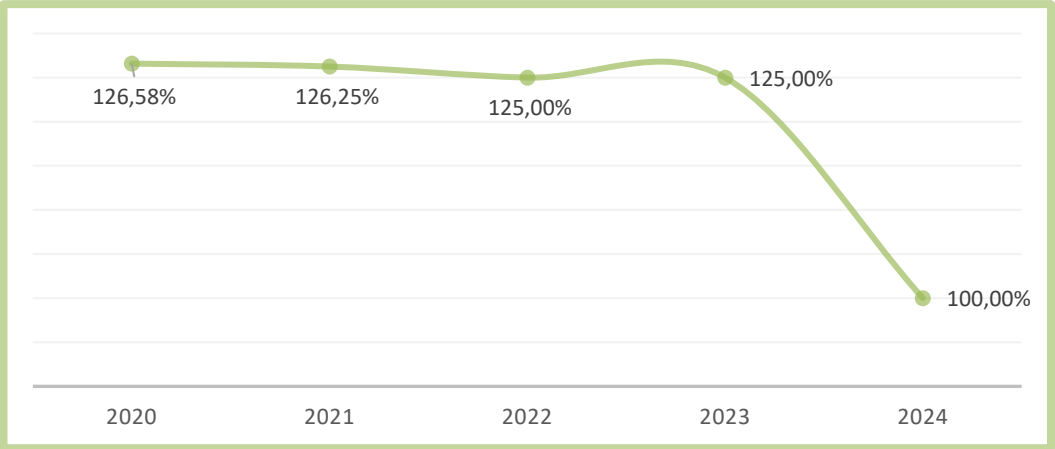


Gambar 2.1 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan Tegalombo 2020-2024

Sumber: Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 2020-2024

Hasil survei kepuasan masyarakat yang menjadi indikator pertama mengalami peningkatan dari sisi target dan realisasi. Target kinerja pada tahun 2020 ditetapkan sebesar 79 dan naik secara bertahap dengan target akhir periode sebesar 83,11 pada tahun 2024. Dilihat dari realisasinya, Kecamatan Tegalombo menunjukkan layanan kepuasan masyarakat yang tinggi. Hal ini dapat dilihat pada capaian tahun 2020 hingga 2024 yang melebihi 100%. Capaian kinerja ini menunjukkan angka yang relatif tinggi, bahkan sempat mencapai puncaknya di tahun 2020 dengan

capaian sebesar 114,29%, sebelum menurun secara bertahap hingga mencapai 99,57% pada tahun 2024. Penurunan capaian ini bukan berarti terjadi kemunduran kinerja, melainkan lebih merefleksikan semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterima. Semakin baik kualitas layanan yang diberikan, masyarakat cenderung memiliki standar penilaian yang juga semakin tinggi. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa meskipun nilai realisasi meningkat, tingkat kepuasan masyarakat bisa saja stagnan atau bahkan menurun apabila tidak disertai inovasi yang dirasakan secara langsung oleh pengguna layanan.

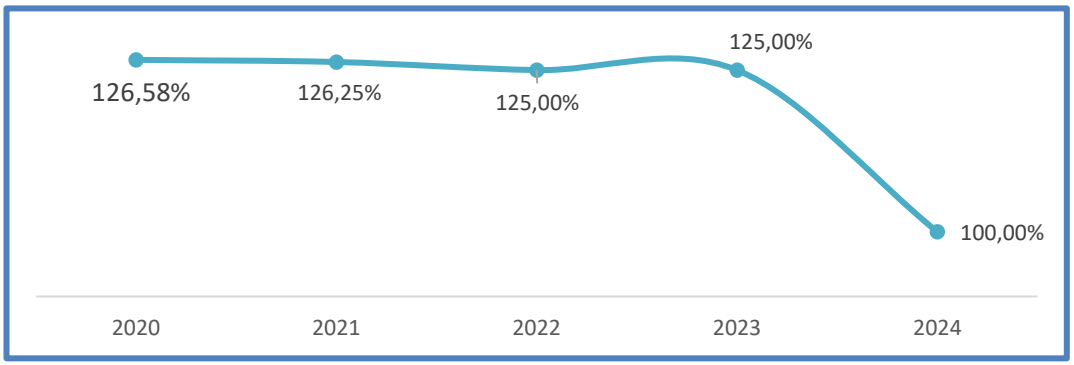


Gambar 2.2 Persentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang Ditindaklanjuti dalam Satu Tahun Bidang: Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, dan Kesejahteraan Sosial

Sumber: Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 2020-2024

Indikator kinerja Kecamatan yang kedua, yaitu persentase rekomendasi fasilitasi yang ditindaklanjuti, menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan optimal. Target selama periode 2020–2024 dirancang dengan kenaikan bertahap, dengan target akhir periode sebesar 100% pada tahun 2024. Realisasi kinerja dari indikator ini mencapai 100% setiap tahunnya, yang menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen tinggi dari aparatur Kecamatan dalam menindaklanjuti rekomendasi fasilitasi lintas bidang seperti pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman, dan

kesejahteraan sosial. Capaian kinerja indikator ini bahkan mencapai angka tertinggi 126,58% pada tahun 2020 dan stabil di kisaran angka 125% hingga 2023, yang menunjukkan bahwa realisasi kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Penurunan capaian menjadi 100% pada tahun 2024 sepenuhnya disebabkan oleh dinaikkannya target ke angka maksimum, bukan karena penurunan realisasi, sehingga tetap mencerminkan kinerja yang sangat baik.



Gambar 2.3 Persentase Desa yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai dengan Ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan
Sumber: Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 2020-2024

Indikator ketiga, yaitu persentase desa yang telah menyusun administrasi sesuai ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan, menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Sejak 2021, realisasi kinerja konsisten mencapai 100%, menandakan seluruh desa di Kecamatan Tegalombo menjalankan administrasi secara tertib dan sesuai regulasi. Capaian kinerja berada pada angka tinggi, mencapai 126,58% pada 2020, 126,25% pada 2021, dan stabil di 125% selama dua tahun berturut-turut (2022–2023), menunjukkan sebagian besar desa melampaui target yang ditetapkan. Penurunan capaian menjadi 100% pada 2024 disebabkan oleh peningkatan target ke angka maksimal, sehingga kinerja tetap sangat baik.

Dari analisis ini, dapat dipahami bahwa kinerja Kecamatan Tegalombo secara umum menunjukkan stabilitas yang sangat baik, terutama dalam hal tindak lanjut rekomendasi dan penyusunan administrasi desa. Namun demikian, satu aspek yang memerlukan perhatian lebih adalah fluktuasi capaian pada indikator kepuasan masyarakat. Meskipun angka realisasi meningkat, tingkat capaian kinerja pada 2024 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa kualitas pelayanan yang diterima masyarakat belum sepenuhnya memenuhi harapan yang semakin berkembang. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan perlu menelaah lebih jauh faktor-faktor penyebabnya, baik dari aspek teknis seperti kecepatan dan kejelasan prosedur pelayanan, maupun dari aspek non-teknis seperti keramahan petugas, transparansi informasi, dan kemudahan akses.

Kesimpulannya, kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo selama lima tahun terakhir dapat dikategorikan sangat baik, dengan pencapaian target yang konsisten bahkan melebihi ekspektasi pada beberapa indikator. Namun demikian, keberhasilan ini perlu dilengkapi dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan yang lebih menyentuh aspek pengalaman pengguna, sehingga kepuasan masyarakat tidak hanya sekadar meningkat secara angka, tetapi juga terasa dalam keseharian mereka sebagai penerima layanan publik. Pendekatan inovatif, evaluasi berkala, dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan akan menjadi kunci untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja yang berkelanjutan.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		**1.567.619.071**	**1.764.300.343**	**1.610.492.730**	**1.931.383.847**		**1.490.323.127**	**1.665.523.587**	**1.573.722.457**	**2.042.378.659**		**95,1%**	**94,5%**	**97,8%**	**105,8 %**	**7,92%**	**12,01%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**33.649.600**	**33.010.000**	**15.441.192**	**15.008.416**		**33.543.500**	**32.813.400**	**15.088.500**	**11.986.500**		**99,7%**	**99,5%**	**97,8%**	**79,9%**	**-19,31%**	**-25,58%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7.983.000	3.750.000	3.478.264	3.478.204		7.926.900	3.599.800	3.395.200	3.478.000		99,3%	96%	97,7%	100%	**-20,09%**	**-19,28%**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.610.400	3.750.000	2.017.915	2.017.915		7.610.400	3.745.800	1.817.600	2.017.500		100%	99,9%	90,1%	100%	**-32,30%**	**-30,42%**
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		2.082.500	3.250.000	1.578.915	2.500.000		2.082.500	3.250.000	1.573.000	1.387.000		100%	100%	99,7%	55,5%	**20,99%**	**-2,45%**
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		8.360.500	7.750.000	1.271.915	2.287.500		8.360.500	7.713.900	1.271.600	1.751.000		100%	99,6%	100%	76,6%	**-3,68%**	**-17,85%**
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			3.500.000	2.224.719	2.224.797			3.500.000	2.222.500	1.021.000			100%	100%	45,9%		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1.353.100	3.750.000	3.130.334			1.303.100	3.749.900	3.130.100			96,4%	100%	100%		**20,21%**	**23,75%**
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.260.100	7.260.000	1.739.130	2.500.000		6.260.100	7.254.000	1.678.500	2.332.000		100%	100%	96,6%	93,3%	**-5,44%**	**-7,35%**
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**1.216.340.631**	**1.387.366.086**	**1.374.583.058**	**1.418.057.864**		**1.215.164.567**	**1.301.522.291**	**1.323.720.857**	**1.462.555.655**		**100%**	**93,9%**	**96,3%**	**103,2 %**	**5,43%**	**6,43%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		1.203.229.338	1.315.902.286	1.337.173.558	1.376.686.364		1.202.053.467	1.214.968.236	1.287.681.957	1.422.287.655		100%	92,4%	96,3%	103,4 %	**4,65%**	**5,84%**

Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1.832.000	56.500.000	34.200.000	32.520.000		1.832.000	67.651.255	32.880.000	32.520.000		100%	119,8 %	96,2%	100%	**979,89%**	**1180,09 %**
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1.620.000	2.500.000	1.659.500	2.950.000		1.620.000	4.420.000	1.659.100	2.638.500		100%	176,8 %	100%	89,5%	**32,82%**	**56,47%**
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		1.503.000	3.000.000		2.801.500		1.503.000	2.979.800		3.027.500		100%	99,4%		108,1 %		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		6.622.900	6.815.000	1.550.000	3.100.000		6.622.900	8.015.000	1.499.800	2.082.000		100%	117,7 %	96,8%	67,2%	**8,55%**	**-7,15%**
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1.533.393	2.648.800				1533200	3488000				100%	131,7 %				
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			**6.600.000**	**2.900.000**	**3.130.500**			**3.780.000**	**3.004.900**	**2.105.000**			**57,3%**	**103,7 %**	**67,3%**		
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			6.600.000	2.900.000	3.130.500			3.780.000	3.004.900	2.105.000			57,3%	103,7 %	67,3%		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**23.613.000**	**21.560.000**	**22.000.000**			**23613000**	**23990000**	**21.980.000**			**100%**	**111,3 %**	**100%**		**-35,55%**	**-35,59%**
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		23.613.000	21.560.000	22.000.000			23613000	23990000	21.980.000			100%	111,3 %	100%		**-35,55%**	**-35,59%**
Administrasi Umum Perangkat Daerah		**77.566.300**	**189.605.450**	**57.903.980**	**322.298.582**		**77.510.650**	**180.590.246**	**77.811.000**	**358.032.450**		**100%**	**95,3%**	**134,4 %**	**111,1 %**	**177,20%**	**145,40%**
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			113.219.300	32.971.625	227.799.430		0	67.634.300	51.016.500	236.640.950			59,8%	154,8 %	103,9 %		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.000.000					3.000.000					100%				
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		50.690.050	45.510.000	8.094.000	63.695.000		50.649.400	62.966.164	10.009.500	93.191.500		100%	138,4 %	123,7 %	146,4 %	**198,17%**	**257,08%**
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		13.876.250	14.876.250	4.138.355			13.876.250	14.876.100	4.100.000			100%	100%	99,1%		**-54,99%**	**-55,08%**
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		13.000.000	13.650.000	12.700.000	30.804.152		12.985.000	32.113.682	12.685.000	28.200.000		99,9%	235,3 %	99,9%	91,6%	**46,86%**	**69,71%**

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**86.690.300**	**13.650.000**	**35.523.500**			**11690260**	**23119000**	**33.142.500**			**13,5%**	**169,4 %**	**93,3%**		**-8,00%**	**13,71%**
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		9.010.500	13.650.000	35.523.500			9010500	23119000	33.142.500			100%	169,4 %	93,3%		**37,25%**	**33,31%**
Pengadaan Mebel		77.679.800					2679760					3,5%					
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**91.270.000**	**79.592.407**	**89.391.000**	**94.417.000**		**92.344.750**	**81.222.350**	**86.274.700**	**99.155.319**		**101,2 %**	**102,1 %**	**96,6%**	**105,1 %**	**1,71%**	**3,04%**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.385.000		6.500.000			6.385.000		6.499.900			100%		100%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		11.165.000	12.000.000	10.891.000	16.891.000		8.549.750	11.886.350	10.774.800	17.430.319		76,6%	99,1%	99%	103,2 %	**17,78%**	**30,48%**
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		61.720.000	67.592.407	72.000.000	77.526.000		66.010.000	69.336.000	69.000.000	81.725.000		107%	102,6 %	95,9%	105,5 %	**7,90%**	**7,67%**
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		12.000.000					11.400.000					95%					
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**38.489.240**	**32.916.400**	**12.750.000**	**78.471.485**		**36.456.400**	**18.486.300**	**12.700.000**	**108.543.735**		**94,8%**	**56,2%**	**99,7%**	**138,4 %**	**146,57%**	**224,69%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		22.546.500	22.546.500	12.750.000	15.000.000		21.893.300	16.636.400	12.700.000	15.912.000		97,2%	73,8%	99,7%	106,1 %	**-8,60%**	**-7,46%**
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					63.471.485					92.631.735					146%		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		15.942.740	10.369.900				14.563.100	1.849.900				91,4%	17,9%				
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**67.109.750**	**96.817.250**	**101.354.000**	**85.229.410**		**64.178.250**	**86.626.245**	**101.122.800**	**79.421.000**		**95,7%**	**89,5%**	**99,8%**	**93,2%**	**11,01%**	**10,08%**
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan		**20.166.500**	**21.250.000**	**29.702.708**	**85.229.410**		**17.391.500**	**21.245.900**	**29.677.700**			**86,3%**	**100%**	**100%**	**0%**	**77,36%**	**-12,72%**

Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		20.166.500	21.250.000	29.702.708	85.229.410		17.391.500	800.000	29.677.700			86,3%	3,8%	100%	0%	**77,36%**	**1138,10 %**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		**60.606.980**	**75.567.250**	**71.651.292**			**46.786.750**	**18.047.545**	**71.445.100**	**79.421.000**		**77,2%**	**23,9%**	**99,8%**		**-26,83%**	**81,87%**
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		60.606.980	75.567.250	71.651.292			46.786.750	18.047.545	71.445.100	79.421.000		77,2%	23,9%	99,8%		**-26,83%**	**81,87%**
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		**###########**	**95.902.000**	**100.900.480**	**119.728.000**		**92.003.450**	**132.420.100**	**100.737.500**	**165.777.500**		**75,2%**	**138,1 %**	**99,9%**	**138,5 %**	**0,74%**	**28,19%**
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**###########**	**95.902.000**	**100.900.480**	**119.728.000**		**92.003.450**	**132.420.100**	**100.737.500**	**165.777.500**		**75,2%**	**138,1 %**	**99,9%**	**138,5 %**	**0,74%**	**28,19%**
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		16.602.000,00	20.602.000		35.070.500		27.127.000	24.241.000		30.510.500		163,4 %	117,7 %		87%		
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		94.277.250,00	75.300.000	100.900.480	84.657.500		64.876.450	108.179.100	100.737.500	135.267.000		68,9%	143,7 %	99,9%	159,8 %	**-0,74%**	**31,38%**
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		**26.411.400,00**	**83.815.006**	**85.676.500,00**	**85.000.000**		**126.303.500**	**10.386.355**	**208.464.000**	**93.174.500**		**478,3 %**	**12,4%**	**243,4 %**	**109,7 %**	**72,93%**	**586,67%**
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		**26.411.400,00**	**83.815.006**	**85.676.500,00**	**85.000.000**		**126.303.500**	**10.386.355**	**208.464.000**	**93.174.500**		**478,3 %**	**12,4%**	**243,4 %**	**109,7 %**	**72,93%**	**586,67%**
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		26.411.400,00	83.815.006	85.676.500,00	85.000.000		126.303.500	10.386.355	208.464.000	93.174.500		478,3 %	12,4%	243,4 %	109,7 %	**72,93%**	**586,67%**

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**54.081.400,00**		**27.055.456,00**	**30.000.000**		**42.171.400**	**34.505.455**	**27.050.400**	**24.695.000**		**78%**		**100%**	**82,4%**		**-16,16%**
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**54.081.400,00**		**27.055.456,00**	**30.000.000**		**42.171.400**	**34.505.455**	**27.050.400**	**24.695.000**		78%		100%	82,4%		**-16,16%**
Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		54.081.400,00		27.055.456,00	30.000.000		42.171.400	34.505.455	27.050.400	24.695.000		78%		100%	82,4%		**-16,16%**
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**83.605.050,00**	**50.800.000**	**87.426.705,00**	**95.000.000**		**83.453.800,00**	**7.519.727,00**	**87.355.900**	**86.429.000**		**99,9%**	**14,9%**	**100%**	**91%**	**13,84%**	**323,21%**
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**83.605.050,00**	**50.800.000**	**87.426.705,00**	**95.000.000**		**83.453.800,00**	**7.519.727,00**	**87.355.900**	**86.429.000**		**99,9%**	**14,9%**	**100%**	**91%**	**13,84%**	**323,21%**
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		32.927.600,00	30.500.000	30.751.331,00	39.500.000		32.813.800,00	-30.000,00	30.748.500			99,7%	-0,1%	100%	0%	**7,30%**	**-34265,03%**
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		23.686.650,00		24.011.762,00			23.682.350,00		23.946.400			100%		99,8%			
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		26.990.800,00	20.300.000	32.663.612,00			26.957.650,00	7.549.727,00	32.661.000			99,9%	37,2%	100%		**-21,29%**	**53,54%**
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					55.500.000					52.355.000					94,4%		

Sumber: Data Capaian dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan 2020-2024.

Berdasarkan data anggaran dan realisasi pendanaan di atas, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020–2024, Kecamatan Tegalombo berhasil menjaga tingkat realisasi anggaran yang tinggi, dengan rata-rata di atas 95% pada hampir seluruh program dan kegiatan. Kegiatan seperti pengadaan sarana kantor, pembangunan infrastruktur kelurahan, dan pemberdayaan masyarakat telah direalisasikan secara optimal, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan seperti Pucangsewu dan Pacitan, yang menunjukkan pengelolaan keuangan yang efisien dan disiplin.

Namun, dari sisi analisis diagnostik, masih terdapat kesenjangan antara realisasi anggaran yang tinggi dengan dampak layanan publik yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Beberapa kegiatan strategis seperti penyediaan layanan komunikasi, pemeliharaan kendaraan, serta sinergi antarinstansi menunjukkan realisasi yang rendah atau belum maksimal. Hal ini mencerminkan adanya kendala teknis, perencanaan yang kurang presisi, dan lemahnya koordinasi lintas sektor.

Secara keseluruhan, Kecamatan Tegalombo telah menunjukkan capaian yang baik dalam aspek pengelolaan anggaran, tetapi perlu memperkuat orientasi terhadap hasil (*outcome*), bukan hanya realisasi fisik atau keuangan. Peningkatan perencanaan berbasis hasil serta kolaborasi antar unit kerja dan antarinstansi menjadi kunci untuk memastikan anggaran benar-benar berdampak pada kualitas layanan dan kesejahteraan masyarakat.

2.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Tegalombo

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan program/kegiatan. Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target utama dari Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan selama periode perencanaan strategis:

Tabel 2.5 Kelompok Sasaran Layanan Kecamatan Tegalombo

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelayanan Umum	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan surat menyurat	Seluruh warga masyarakat
2	Pemerintahan	Pembinaan dan fasilitasi Pemerintahan Desa	Perangkat Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa
3	Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dukungan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	Kelompok Masyarakat di Desa dan Kelurahan
4	Sosial, Ketentraman dan Ketertiban	Penanganan laporan Ketertiban umum, Kebencanaan, dan koordinasi keamanan	Masyarakat umum, Tokoh Masyarakat, aparat keamanan

Sumber: Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kecamatan Tegalombo telah mengidentifikasi kelompok sasaran layanan berdasarkan empat bidang utama, yaitu Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Sosial,

Ketentraman, dan Ketertiban. Setiap bidang memiliki jenis layanan dan penerima manfaat yang spesifik, mulai dari seluruh warga masyarakat, perangkat desa, kelompok masyarakat di desa dan kelurahan, hingga tokoh masyarakat dan aparat keamanan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang inklusif dan berbasis kebutuhan dalam penyelenggaraan layanan publik.

Pengelompokan sasaran ini memungkinkan Kecamatan Tegalombo untuk menyusun strategi pelayanan yang lebih terarah, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok. Layanan administratif, pemberdayaan, dan sosial dapat disesuaikan agar lebih tepat guna dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain itu, hal ini mempermudah perumusan kebijakan dan program yang lebih relevan serta berdampak langsung terhadap masyarakat.

Secara keseluruhan, penetapan kelompok sasaran yang rinci memperlihatkan bahwa Kecamatan Tegalombo telah menerapkan perencanaan pelayanan publik yang responsif. Upaya ini mendorong peningkatan efektivitas program serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Dengan strategi ini, pelayanan publik tidak hanya lebih terarah tetapi juga berpotensi memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat lokal.

2.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kemitraan ini mencakup unsur pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media, yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan. Berikut ini adalah rincian mitra perangkat daerah yang berperan dalam mendukung kinerja pelayanan Kecamatan Tegalombo:

Tabel 2.6 Mitra Kecamatan Tegalombo

No	Mitra Kecamatan Tegalombo	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Puskesmas Tegalombo	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan
2	Puskesmas Gemaharjo	Menyediakan Pelayanan Cek Kesehatan Gratis, Sosialisasi dan Penanganan Penyakit, Koordinasi Lintas Sektor	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam penerapan Kesehatan Lingkungan
3	KUA Kecamatan Tegalombo	Koordinasi Keagamaan, Pernikahan, dan Safari Ramadhan	Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan dini dan Bekerjasama dalam hal Keagamaan
4	Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (BPKB)	Menyediakan Pelayanan Keluarga Berencana dan Koordinasi Mini Lokakarya Lintas Sektor dan Kader IMP	Meningkatkan pemahaman terkait Keluarga Berencanadi wilayah Kecamatan Tegalombo
5	Korwil Dinas Pendidikan	upaya mendukung dan memperkuat penyelenggaraan pendidikan di wilayah kecamatan	Koordinasi dan Pembinaan Sekolah, pendampingan Program pendidikan, dan Penyediaan data dan Informasi
6	Polsek Tegalombo	mendukung keamanan, ketertiban, dan pelayanan publik secara terpadu di tingkat kecamatan	Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Sosialisasi Penyuluhan Hukum, dan Pengawasan/Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kecamatan
7	Koramil Tegalombo	mendukung stabilitas wilayah, ketahanan nasional, dan pembinaan masyarakat di tingkat kecamatan	Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Wawasan Kebangsaan, dukungan pengamanan dan Ketertiban, dan pendampingan kegiatan pembangunan Desa (TMMD & Karya Bakti)
8	Badan Kerjasama Antar Desa	mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan	Koordinaasi Program Pembangunan Antar Desa, Pengelolaan Bersama Infrastuktur Antar Desa, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Desa, dan Pelaporan dan Monitoring Program Bersama
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)	Layanan administrasi kependudukan (perekaman e-KTP, KK, akta kelahiran), layanan keliling dokumen kependudukan	Mempermudah akses dokumen kependudukan masyarakat dan meningkatkan akurasi data penduduk

No	Mitra Kecamatan Tegalombo	Jenis Layanan	Dukungan Kinerja
10	Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)	Sosialisasi pelatihan kerja, informasi lowongan kerja, fasilitasi pemagangan dan sertifikasi kompetensi	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal di wilayah Kecamatan Tegalombo
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)	Pendampingan program pemberdayaan masyarakat, pelatihan aparatur desa, fasilitasi penguatan BUMDes	Meningkatkan kapasitas kelembagaan desa dan mendorong kemandirian ekonomi desa

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kecamatan Arjosari Tahun 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel ini memiliki peran penting dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Kecamatan Tegalombo. Kolaborasi yang terjalin antara Kecamatan Tegalombo dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah melalui penyediaan layanan publik dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dalam lingkup Kabupaten Pacitan, keberadaan BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Bank Daerah telah memberikan dukungan nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, secara khusus Kecamatan Tegalombo hingga saat ini belum sepenuhnya terjangkau oleh layanan BUMD, sehingga manfaat langsung yang diterima masyarakat masih terbatas.

2.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kecamatan Tegalombo memiliki tanggung jawab strategis dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi setiap kerja sama yang dilakukan, baik antardaerah maupun dengan pihak ketiga. Kerja sama ini harus selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi.

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan bertugas untuk memastikan bahwa setiap bentuk kerja sama yang dijalin dapat mendukung tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Identifikasi terhadap jenis kerja sama yang telah dilakukan dan evaluasi pelaksanaannya sangat diperlukan untuk menilai efektivitas serta keberlanjutan dari kerja sama tersebut. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan memberikan manfaat yang optimal bagi daerah dan masyarakat, serta memastikan kesesuaiannya dengan rencana pembangunan daerah yang ada.

2.8 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan memiliki beragam tantangan yang dapat memengaruhi kualitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Permasalahan tersebut dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya infrastruktur yang memadai, hingga kendala dalam sistem dan proses pelayanan yang belum optimal. Analisis terhadap permasalahan ini sangat penting untuk memahami akar penyebabnya, serta untuk

merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berikut adalah pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Tegalombo dalam penyelenggaraan pelayanan, yang dapat dijabarkan lebih lanjut melalui tabel berikut:

Tabel 2.7 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Kecamatan Tegalombo

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum berjalan secara optimal	Pengelolaan administrasi dan keuangan desa/kelurahan belum efisien dan akuntabel	• Kualitas dan kapasitas aparatur desa otonomi/kelurahan masih terbatas • Rendahnya tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan keuangan • Pengawasan APIP belum optimal
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	Kurangnya partisipasi warga dalam kegiatan pembangunan	• Rendahnya literasi masyarakat terkait peran dalam perencanaan • Adanya pesimisme bahwa aspirasi tidak diakomodasi • Kurangnya inisiatif dari pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan • Minimnya keterlibatan warga dalam forum Musrenbang desa dan kecamatan
3	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Sistem pendataan dan pengelolaan informasi kesejahteraan sosial belum	• Keterbatasan SDM di tingkat kecamatan dan desa dalam hal teknis pendataan • Ketiadaan perangkat dan infrastruktur penunjang

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		terstruktur dan mutakhir	
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Rendahnya kesadaran hukum	• Aktivitas pedagang yang melampaui batas area pasar resmi • Sarana parkir yang belum memadai • Kesadaran masyarakat terhadap ketertiban masih rendah • Penyebaran HIV dan AIDS di kalangan anak muda • Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih rendah • Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) 3R (*Reduce, reuse, recycle*)
5	Akses layanan publik belum merata	Prosedur administrasi belum optimal	• SDM pelayanan belum berorientasi pada etika kerja dan kepuasan publik
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Jalan desa rusak, drainase buruk dan fasilitas kantor banyak yang belum layak	• Minimnya alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan renovasi infrastruktur • Kondisi geografis menyulitkan pembangunan infrastruktur • Air meluap saat hujan deras
7	Ketahanan air bersih	Kekeringan musiman dan banyaknya rumah tanpa sanitasi layak	• Ketergantungan terhadap air hujan atau sumber terbatas

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			• Program air bersih belum menjangkau semua wilayah
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel	Adanya kegiatan tidak sesuai realisasi dan belum terpantau secara efektif	• Pengawasan internal belum kuat • Perencanaan kegiatan tidak berbasis kebutuhan riil • Minimnya akuntabilitas dalam pelaporan kegiatan

Sumber: Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan pemetaan permasalahan pelayanan yang tercantum dalam tabel di atas, dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Tegalombo. Permasalahan-permasalahan ini akan menjadi salah satu sumber utama dalam merumuskan isu-isu strategis yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Penyelesaian terhadap isu strategis ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan perangkat daerah ke depan.

2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan daerah. Dampak isu strategis dapat memengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Penentuan isu strategis pada Kecamatan Tegalombo didasarkan pada potensi dan permasalahan, telaahan Renstra K/L, Renstra perangkat daerah Provinsi, KLHS RPJMD, dan RPJMD Kabupaten Pacitan dengan rincian sebagai berikut:

2.2.2.1 Isu Global

Isu global merujuk pada kondisi, tren, atau tantangan yang bersifat lintas negara dan dapat memengaruhi negara serta daerah.

Isu ini mencakup perubahan iklim, krisis ekonomi global, pandemi, kemajuan teknologi, serta dinamika sosial dan politik internasional yang mempengaruhi perekonomian, lingkungan, dan kehidupan masyarakat di tingkat daerah. Isu global yang relevan dengan Kecamatan Tegalombo adalah sebagai berikut:

1. Kenaikan suhu dan krisis air global
2. Sampah Plastik dan Limbah Rumah Tangga
3. Ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan

2.2.2.2 Telaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga

jika dilihat dari telaah Renstra K/L, Kecamatan Tegalombo tidak memiliki relevansi terhadap Renstra K/L

2.2.2.2 Telaah Isu Nasional

Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Indonesia memiliki beberapa batasan pembangunan yang memerlukan strategi kebijakan secara khusus. Berikut batasan pembangunan nasional yang relevan dengan kondisi Kabupaten Pacitan:

2.2.2.3.1 Luas Permukiman di Area Pesisir Terdampak Perubahan Iklim

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 311 kabupaten/kota, 1.643 kecamatan, dan 6.367 desa/kelurahan di wilayah pesisir Indonesia yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Wilayah ini berpotensi besar mengalami pcrpindahan penduduk, khususnya akibat abrasi dan bencana hidrometeorologi seperti banjir pesisir atau rob. Dalam kurun waktu 5-l0 tahun terakhir, sekitar 234 kabupaten/kota, 796 kecamatan, dan 1.888 desa/kelurahan atau sekitar 3O persen dari total desa pesisir di Indonesia telah menunjukkan potensi perpindahan penduduk. Daerah ini mencakup 150 desa di kawasan metropolitan serta 92 desa di pulau-pulau kecil terluar, yang semakin memperparah risiko sosial-ekonomi.

Pcrubahan iklim diprediksi akan membawa dampak jangka panjang yang signilikan bagi masyarakat pesisir. Data dari climate central menyebutkan bahwa sekitar 23 juta penduduk pesisir di Indonesia diproyeksikan akan menghadapi banjir laut tahunan pada tahun 2050 akibat kenaikan muka air laut. Oleh karena itu, penting untuk memahami profil wilayah pesisir yang rentan agar bisa merancang strategi mitigasi dan adaptasi yang tepat. Profil ini harus mencakup kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berperan besar dalam menentukan ketahanan masyarakat pesisir.

2.2.2.3.2 Ketersediaan Air

Indonesia memiliki potensi besar dalam sumber daya air untuk mendukung berbagai sektor kehidupan, terutama di tengah pertumbuhan populasi dan peningkatan aktivitas ekonomi. Ketersediaan air yang memadai sangat penting untuk menjamin pasokan air bersih, mendukung sektor pertanian, serta menopang berbagai industri yang menjadi pilar pembangunan. Potensi sumber daya air lndonesia tersebar di beberapa wilayah, dengan total air permukaan sebesar 2.783,3 miliar m^3 per tahun dan potensi air tanah dari cekungan air tanah sebesar 20.903,3 miliar m^3 per tahun. Namun demikian, potensi sumber daya air ini tidak diimbangi dengan penyebarannya.

Penyebaran potensi air di Indonesia belum merata baik secara musim maupun geografis. Wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa, yang menampung 56,1 persen populasi nasional, hanya memiliki 6,3 persen dari total ketersediaan air permukaan. Sebaliknya, wilayah-wilayah dengan sumber daya air melimpah seperti Papua (27,6 persen), Kalimantan (28,5 persen), dan Sumatera (26,1 persen) menampung populasi yang jauh lebih kecil. Ketidakseimbangan distribusi air ini menimbulkan kelangkaan (water stress) yang lebih besar di daerah-daerah dengan permintaan air tinggi.

Di sisi lain, keberadaan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air alami tertekan akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan. Saat ini, 12,7 juta hektare lahan kritis sudah tidak berfungsi sebagai media pengatur tata air. Di sisi lain, jumlah hari hujan cenderung menurun, sementara intensitas hujan lebih lebat dan ekstrem. Perubahan ini meningkatkan risiko banjir di daerah hilir saat kejadian hujan ekstrem serta memperpanjang periode kekeringan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan untuk mendukung ketersediaan air dalam memenuhi permintaan air di masa mendatang.

Selain batasan pembangunan, dalam RPJMN 2025-2029 juga dibahas tentang peluang dan tantangan pembangunan. Berikut peluang dan tantangan pembangunan yang relevan dengan kondisi Kabupaten Pacitan:

2.2.2.3.3 Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mcncapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakeriaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut Laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya opcrasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

2.2.2.3.4 Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/Corruption Perception Index lndonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari I80 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilalu Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian

pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.2.2.3 Telaah Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Periode 2025-2029

Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) mengidentifikasi isu-isu strategis terkait pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Laporan ini memberikan dasar bagi kebijakan dan program pembangunan daerah, agar selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Oleh karena itu, isu-isu dalam KLHS RPJMD perlu diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Isu-isu ini merupakan hasil identifikasi berbagai permasalahan pembangunan berkelanjutan, yang telah melalui proses penjaringan, pengelompokan, serta pembobotan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2016. Dalam konteks kecamatan di Kabupaten Pacitan, isu pelayanan publik yang strategis mencakup aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta tata kelola pemerintahan.

2.2.2.3.1 Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas pelayanan publik di kecamatan sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Rendahnya pemanfaatan e-procurement serta belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat kecamatan menjadi tantangan yang harus diatasi

melalui reformasi tata kelola publik yang lebih akuntabel dan responsif.

Latar Belakang: Tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan masih sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah yang dominan berbasis sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan). Ketergantungan terhadap sektor informal, rendahnya nilai tambah produksi, dan keterbatasan akses ke modal serta pasar menjadi kendala utama dalam mengangkat taraf hidup masyarakat.

Tingkat pengangguran terbuka memang rendah, namun sebagian besar masyarakat bekerja di sektor informal dengan produktivitas rendah dan tanpa perlindungan sosial. Potensi ekonomi lokal seperti hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) belum dimanfaatkan secara optimal.

Urgensi: Ketika sektor ekonomi masyarakat lemah, maka ketahanan sosial dan daya saing daerah akan menurun. Kesejahteraan ekonomi bukan hanya urusan pendapatan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemandirian, keberdayaan, dan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan.

Relevansi Data:

- TPB 8.1.1: Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Pacitan menunjukkan perlambatan.
- TPB 8.3.1: Rendahnya proporsi tenaga kerja di sektor formal dan produktif.
- TPB 8.10.1: Keterjangkauan dan ketersediaan lembaga keuangan belum merata, terutama di desa terpencil.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Masih rendahnya investasi lokal dan daya beli masyarakat.

- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan pada peningkatan kesejahteraan ekonomi berbasis potensi lokal.
- Masukan FKP: Masyarakat membutuhkan akses pelatihan, pembiayaan, dan pemasaran hasil usaha mikro.

Kesimpulan: RPJMD perlu mengarahkan program pembangunan ekonomi rakyat yang berbasis potensi lokal, seperti pengembangan pertanian organik, perikanan tangkap dan budidaya, produk kreatif, serta pariwisata berbasis komunitas. Dukungan pemerintah sangat dibutuhkan dalam bentuk kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, penguatan koperasi, serta digitalisasi pemasaran produk lokal. Ekonomi kerakyatan yang kuat akan menciptakan kemandirian desa dan memperkuat kohesi sosial di tingkat akar rumput.

2.2.2.3.2 Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Isu ini sangat relevan untuk kecamatan karena pemerataan pelayanan kesehatan menjadi kunci dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Masih terdapat kecamatan dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata serta rendahnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kecamatan seperti Nawangan dan Bandar memiliki keterbatasan dalam akses terhadap fasilitas dan tenaga medis. Oleh karena itu, peningkatan pelayanan kesehatan perlu difokuskan hingga level kecamatan.

Latar Belakang: Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun dalam konteks Kabupaten Pacitan, kesenjangan geografis berupa wilayah perbukitan dan pesisir menyebabkan tidak meratanya distribusi layanan kesehatan dasar. Ketimpangan ini menyebabkan masyarakat di wilayah tertentu menghadapi hambatan untuk mengakses layanan persalinan,

imunisasi, penanganan penyakit menular dan tidak menular, serta layanan kesehatan jiwa.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas kesehatan masih terpusat di kawasan perkotaan atau ibukota kecamatan, sedangkan desa-desa di daerah pinggiran belum dilengkapi dengan Puskesmas pembantu atau Poskesdes yang memadai. Selain itu, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk juga masih jauh dari standar ideal.

Urgensi: Ketimpangan akses ini berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya kasus bunuh diri, serta rendahnya cakupan jaminan kesehatan. Bila dibiarkan, hal ini akan memperparah ketimpangan kualitas hidup dan memperbesar beban kesehatan publik. Dalam konteks jangka panjang, lemahnya sistem kesehatan lokal juga akan menurunkan produktivitas masyarakat dan memperberat beban fiskal pemerintah.

Relevansi Data:

- TPB 3.1.2: Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih belum merata.
- TPB 3.2.1 & 3.2.2: Angka kematian balita dan neonatal tinggi.
- TPB 3.4.2: Angka kasus bunuh diri meningkat, menandakan kebutuhan layanan kesehatan mental.
- TPB 3.8.2(a): Cakupan jaminan kesehatan belum universal.
- TPB 3.c.1: Rasio tenaga medis per penduduk rendah.

Sumber Lain: Masukan publik dari FKP mendorong peningkatan layanan kesehatan keliling dan penyediaan ambulans desa. RPJPD Provinsi dan Kabupaten menekankan pentingnya pembangunan SDM berkualitas, dimulai dari layanan kesehatan dasar yang adil dan merata.

Kesimpulan: Pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan harus menjadi prioritas dalam RPJMD. Pemerintah daerah perlu menyusun strategi lintas sektor yang

mencakup penyediaan dan pemerataan fasilitas, insentif tenaga kesehatan, pengembangan layanan bergerak (mobile health), integrasi kesehatan jiwa dalam layanan dasar, serta digitalisasi sistem layanan kesehatan (telemedicine, rekam medis elektronik). Strategi ini akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap krisis kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

2.2.2.3.3 Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan

Sebagian wilayah kecamatan di Kabupaten Pacitan masih memiliki angka partisipasi sekolah dan infrastruktur pendidikan yang belum optimal. Isu ini penting untuk menghindari disparitas pendidikan antar wilayah serta meningkatkan kualitas SDM di tingkat lokal.

Latar Belakang: Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, meskipun sudah terdapat kemajuan dalam akses pendidikan dasar, namun masih terdapat kesenjangan dalam hal partisipasi dan kualitas pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan pedesaan. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan infrastruktur, kekurangan guru yang kompeten, serta terbatasnya akses terhadap teknologi pendidikan.

Kondisi geografis Pacitan yang terdiri dari perbukitan dan wilayah pesisir juga menyebabkan tantangan distribusi fasilitas pendidikan. Selain itu, kurangnya motivasi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak ke jenjang lebih tinggi masih menjadi permasalahan sosial yang belum terselesaikan.

Urgensi: Jika tidak segera ditangani, rendahnya partisipasi sekolah dan buruknya fasilitas pendidikan akan memperbesar kesenjangan sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas tenaga kerja, ketimpangan pendapatan, dan lambatnya inovasi daerah.

Pendidikan adalah jembatan utama untuk mobilitas sosial vertikal dan pengentasan kemiskinan.

Relevansi Data:

- TPB 4.1.1(d & e): Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP masih di bawah target nasional.
- TPB 4.6.1(a): Tingkat melek aksara masih menunjukkan disparitas antara wilayah dan kelompok usia.
- TPB 4.a.1: Proporsi sekolah yang memiliki fasilitas dasar (air, sanitasi, listrik, internet) masih rendah.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: IPM Pacitan masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur, dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) < 8 tahun.
- Masukan FKP: Menuntut peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, dan dukungan terhadap pendidikan vokasi.
- KLHS RPJPD Kabupaten: SDM yang rendah menjadi faktor pembatas utama terhadap inovasi dan daya saing daerah.

Kesimpulan: RPJMD perlu memberikan perhatian khusus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui revitalisasi fasilitas sekolah, pembangunan sekolah baru di wilayah yang underserved, pelatihan dan insentif guru, serta digitalisasi pembelajaran. Selain itu, penting untuk mengembangkan sistem pendidikan vokasi dan alternatif yang sesuai dengan potensi lokal guna menjembatani kesenjangan dunia pendidikan dan dunia kerja.

2.2.2.3.4 Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang tinggi di beberapa kecamatan menandakan perlunya pendekatan pelayanan publik yang inklusif. Pelayanan sosial dasar seperti akses listrik, air minum, dan jaminan sosial menjadi elemen penting yang perlu diprioritaskan di tingkat kecamatan.

Latar Belakang: Kemiskinan masih menjadi tantangan besar di Kabupaten Pacitan. Meskipun angka kemiskinan secara agregat menunjukkan tren penurunan, namun karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat struktural dan multidimensional. Penduduk miskin tidak hanya menghadapi persoalan pendapatan, tetapi juga akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, sanitasi, dan energi. Sebagian besar keluarga miskin tinggal di wilayah-wilayah dengan akses geografis terbatas dan minim fasilitas publik.

Kemiskinan juga bersinggungan dengan ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial, di mana terjadi konsentrasi pembangunan di wilayah tertentu sementara daerah lainnya tertinggal. Oleh karena itu, persoalan kemiskinan di Pacitan perlu ditangani tidak hanya dengan pendekatan karitatif atau jangka pendek, tetapi melalui transformasi struktural yang menjamin keadilan sosial dan ekonomi.

Urgensi: Jika dibiarkan, kemiskinan dapat menjadi sumber ketimpangan dan penghambat pertumbuhan daerah secara menyeluruh. Masyarakat miskin juga lebih rentan terhadap risiko bencana, penyakit, dan gejolak ekonomi, sehingga ketahanan sosial daerah menjadi lemah. Penanggulangan kemiskinan merupakan kunci untuk membuka akses terhadap hak-hak dasar dan memberdayakan masyarakat dari bawah.

Relevansi Data:

- TPB 1.2.1: Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Pacitan masih di atas 13%, melampaui rata-rata nasional (<8%).
- TPB 1.3.1 (a, b, c): Cakupan kepesertaan dalam program jaminan sosial dan kesehatan masih rendah.
- TPB 1.4.1 (d, e, k): Masih terdapat rumah tangga miskin yang belum memiliki akses terhadap air layak, sanitasi layak, dan listrik.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Ketimpangan spasial yang tinggi antara desa dan kota, serta terbatasnya anggaran afirmatif.
- Masukan FKP: Kebutuhan akan peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan subsidi layanan dasar.
- RPJPD Provinsi dan Kabupaten: Menekankan penghapusan kemiskinan ekstrem dan penguatan program integratif.

Kesimpulan: Isu kemiskinan harus dijawab dengan strategi intervensi multi-sektor yang komprehensif dan berkelanjutan. RPJMD Kabupaten Pacitan harus menjamin pemenuhan hak dasar melalui program akses layanan dasar gratis atau bersubsidi, penguatan basis data kemiskinan terintegrasi, peningkatan pelatihan dan kewirausahaan produktif, serta pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas. Sinergi lintas OPD serta pelibatan dunia usaha dan masyarakat sipil sangat penting dalam menciptakan ekosistem pengentasan kemiskinan yang inklusif.

2.2.2.3.5 Peningkatan Infrastruktur Daerah

Banyak kecamatan di Pacitan yang masih memerlukan peningkatan akses jalan, jaringan transportasi, dan fasilitas umum lainnya. Isu ini sangat strategis karena keterhubungan antar wilayah memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Latar Belakang: Infrastruktur memiliki peran penting sebagai pengungkit pembangunan wilayah. Di Kabupaten Pacitan, banyak wilayah belum terhubung secara optimal melalui jaringan jalan utama dan infrastruktur dasar lainnya. Konektivitas antar wilayah, antar kecamatan, dan aksesibilitas ke pusat-pusat ekonomi dan layanan publik masih menjadi tantangan besar.

Pembangunan infrastruktur juga terkait langsung dengan efisiensi logistik, mobilitas penduduk, pengembangan kawasan strategis, dan peningkatan produktivitas ekonomi lokal.

Keterbatasan jaringan irigasi, infrastruktur digital, dan sarana transportasi publik turut menghambat percepatan pembangunan daerah.

Urgensi: Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pertumbuhan ekonomi daerah akan stagnan, pelayanan publik tidak optimal, serta ketimpangan wilayah semakin lebar. Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan lintas sektor, baik untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, maupun UMKM.

Relevansi Data:

- Tidak tersedianya akses jalan mantap yang merata ke seluruh desa.
- Masih banyak wilayah blank spot untuk jaringan komunikasi dan internet.
- Infrastruktur penunjang transportasi publik dan logistik belum terintegrasi.

Sumber Lain:

- RTRW dan RPJPD: Menetapkan pengembangan infrastruktur strategis sebagai bagian dari tata ruang dan arah pembangunan wilayah jangka panjang.
- Masukan FKP: Aspirasi masyarakat terkait perbaikan jalan, jembatan, infrastruktur pengairan, listrik desa, dan perluasan jaringan internet.
- Kondisi Umum Daerah: Keterbatasan fiskal menjadi hambatan pembangunan infrastruktur secara massif, memerlukan skema kemitraan.

Kesimpulan: RPJMD harus mengarahkan penguatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan iklim. Perluasan konektivitas antar wilayah, digitalisasi infrastruktur publik, pemanfaatan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha), serta pembangunan berbasis kawasan strategis menjadi langkah penting.

Infrastruktur yang kuat dan merata akan membuka isolasi wilayah, menumbuhkan pusat pertumbuhan baru, dan mempercepat transformasi ekonomi daerah.

2.2.2.3.6 Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air

Latar Belakang: Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia dan pilar penting dalam mendukung kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, serta keberlanjutan lingkungan. Kabupaten Pacitan menghadapi permasalahan serius terkait pencemaran sungai akibat limbah domestik dan pertanian, rendahnya kualitas air baku, serta keterbatasan layanan penyediaan air bersih, khususnya di wilayah perbukitan dan pelosok desa.

Sebagian masyarakat masih mengandalkan sumber air permukaan atau sumur gali yang kualitasnya tidak terjamin. Selain itu, terdapat tantangan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang rusak akibat alih fungsi lahan dan minimnya upaya konservasi hulu. Perubahan iklim juga turut memperparah krisis ketersediaan air di musim kemarau.

Urgensi: Tanpa ketersediaan air yang cukup dan berkualitas, upaya peningkatan derajat kesehatan, produktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat tidak akan optimal. Peningkatan kualitas air dan akses air bersih juga merupakan indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan hak dasar masyarakat.

Relevansi Data:

- TPB 6.1.1: Akses terhadap layanan air minum layak dan aman belum menjangkau seluruh penduduk.
- TPB 6.3.2: Kualitas air sungai menurun karena pencemaran domestik dan pertanian.

Sumber Lain:

- Kondisi Umum Daerah: Daya dukung air menurun, ketersediaan air musiman, dan banyak desa mengalami kekeringan saat musim kemarau.
- RTRW dan KLHS: Menggarisbawahi pentingnya perlindungan daerah tangkapan air, rehabilitasi DAS, dan pemanfaatan teknologi pengolahan air bersih.
- Masukan FKP: Permintaan masyarakat atas akses air bersih yang lebih luas dan terjangkau serta pengurangan pencemaran air sungai dari limbah rumah tangga dan pertanian.

Kesimpulan: RPJMD harus mengutamakan pengelolaan air terpadu (integrated water resources management) dengan pendekatan konservasi, rehabilitasi, dan penguatan layanan air bersih. Strategi yang perlu diambil meliputi pembangunan infrastruktur air bersih di wilayah sulit akses, peningkatan kualitas SPAM desa, pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, serta penguatan kelembagaan pengawasan pencemaran air. Ketersediaan air bersih yang adil dan berkelanjutan akan meningkatkan kesehatan publik dan daya dukung ekosistem daerah.

2.2.2.4 Telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan. Salah satu komponen penting dalam RPJMD adalah identifikasi isu strategis daerah (isu regional) yang bersumber dari kondisi faktual, potensi, serta tantangan pembangunan di wilayah Kabupaten Pacitan Isu strategis tersebut menggambarkan agenda prioritas yang harus ditangani secara

terencana dan terpadu oleh seluruh Perangkat Daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Isu strategis daerah yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan perlu diintegrasikan ke dalam perencanaan Perangkat Daerah agar tercipta keselarasan arah kebijakan dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun isu strategis daerah yang relevan antara lain sebagai berikut:

1. Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah;
3. Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat;
4. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan.

Berikut penjabaran lebih lanjut terkait telaah RPJMD:

2.2.2.4.1 Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya

Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas strategis dalam RPJMD Kabupaten Pacitan yang diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, derajat kesehatan, serta pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Isu strategis *Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya* menuntut pemerataan akses terhadap layanan dasar hingga tingkat kecamatan dan desa sebagai basis pembangunan manusia. Berdasarkan data BPS dan OPD teknis, masih terdapat kesenjangan signifikan dalam kualitas dan distribusi layanan pendidikan serta kesehatan antarkecamatan. Hal ini terutama terjadi di wilayah terpencil seperti Kecamatan Nawangan, Bandar, dan Donorojo yang menghadapi hambatan geografis berupa pegunungan dan akses transportasi terbatas.

Permasalahan dan Urgensi

a. **Sektor Kesehatan**

- Data Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa dari 24 kecamatan, hanya sebagian yang memiliki fasilitas kesehatan memadai, dan sebagian besar tenaga medis masih terpusat di Kecamatan Tegalombo.
- Rasio dokter per 100.000 penduduk Kabupaten Pacitan masih di bawah standar ideal WHO (1:1.000).
- Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Pacitan per 2023 hanya sekitar 74,8% dari total penduduk (Sumber: Dinkes Pacitan, 2023).
- Angka Kematian Ibu (AKI) masih tercatat 112 per 100.000 kelahiran hidup pada 2022, di atas target nasional.

b. Sektor Pendidikan

- Berdasarkan *Kabupaten Pacitan Dalam Angka 2024* (BPS, 2024), Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK di beberapa kecamatan masih berada di bawah 70%.
- Masih terdapat kekurangan guru di daerah terpencil, terutama pada jenjang SMP dan SMA.
- Rasio murid terhadap guru di beberapa SD di Kecamatan Tulakan dan Nawangan masih di atas 30:1 (BPS Pacitan, 2024).
- Fasilitas penunjang seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet masih minim di luar wilayah pusat kota.

Kecamatan Tegalombo memiliki akses layanan dasar yang cukup baik dengan keberadaan Puskesmas dan sekolah yang menjadi sentra pembangunan masyarakat. Namun, jaraknya yang relatif jauh dari pusat kota menjadikan kolaborasi lintas sektor sangat penting. Dengan sinergi yang baik, Kecamatan Tegalombo dapat berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat Pacitan yang sehat, terdidik, dan berbudaya.

2.2.2.4.2 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah

Pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Kabupaten Pacitan, diarahkan pada optimalisasi potensi sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan. Kecamatan Tegalombo sebagai pusat pemerintahan sekaligus sentra pariwisata dan perdagangan, memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi kawasan. Namun demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur dasar, ketahanan lingkungan, dan kapasitas produksi masyarakat di sektor-sektor produktif.

Permasalahan dan Urgensi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pacitan yang bertumpu pada sektor pariwisata dan pertanian menghadapi tantangan serius terkait keterbatasan infrastruktur dasar yang menopang keberlanjutan dua sektor unggulan tersebut. Salah satu permasalahan mendasar adalah belum meratanya akses air bersih di berbagai kecamatan, terutama di wilayah perbukitan seperti Tulakan, Tegalombo, dan Punung. Masyarakat di wilayah ini masih mengandalkan air permukaan dan sumur dangkal, yang dari sisi kualitas dan kuantitas belum memenuhi standar layak konsumsi. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa akses air minum layak di Kabupaten Pacitan baru mencapai 77,5%, sedangkan cakupan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PDAM belum mampu menjangkau seluruh desa, khususnya di wilayah dengan topografi sulit. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga menghambat pengembangan sektor pariwisata dan pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air bersih yang berkelanjutan.

Selain keterbatasan air, kawasan-kawasan wisata unggulan seperti Pringkuku, Donorojo, dan Punung juga berada di zona

rawan bencana, termasuk ancaman tanah longsor, tsunami, dan gempa bumi. Minimnya infrastruktur mitigasi bencana di kawasan-kawasan ini, seperti jalur evakuasi, shelter aman, dan sistem peringatan dini, menempatkan keselamatan pengunjung dan pelaku usaha dalam risiko tinggi. Laporan Indeks Risiko Bencana Indonesia (BNPB, 2023) menunjukkan bahwa Kabupaten Pacitan tergolong dalam kategori risiko tinggi, sementara hasil pemetaan BPBD Pacitan mencatat banyak destinasi wisata yang belum dilengkapi sarana mitigasi yang memadai. Ketiadaan sistem ketangguhan bencana yang terintegrasi dapat merusak citra destinasi, memicu kerugian ekonomi, dan menghambat investasi di sektor pariwisata.

Di sisi lain, sektor pertanian yang menjadi fondasi ekonomi mayoritas masyarakat Pacitan masih menghadapi tantangan struktural. Kecamatan seperti Nawangan, Arjosari, dan Tulakan menunjukkan ketergantungan tinggi pada sistem pertanian konvensional yang kurang adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar. Rendahnya adopsi teknologi pertanian, alih fungsi lahan, serta keterbatasan infrastruktur irigasi menyebabkan menurunnya produktivitas lahan. Rata-rata hasil panen padi di wilayah ini masih berada di bawah 5 ton/ha (Dinas Pertanian, 2022), dan lebih dari 30% lahan sawah tadah hujan mengalami kerusakan jaringan irigasi (DPUTR, 2023). Kerawanan pangan musiman di sejumlah wilayah pedesaan, sebagaimana tercatat dalam indikator TPB 2.1.1, semakin mempertegas perlunya revitalisasi sistem ketahanan pangan daerah.

Keterkaitan antara ketiga isu ini menunjukkan bahwa pembangunan sektor pariwisata dan pertanian tidak bisa dilepaskan dari perbaikan infrastruktur dasar, penguatan sistem ketahanan lingkungan, serta peningkatan kapasitas adaptif masyarakat lokal. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi lokal, sebagaimana ditetapkan dalam isu strategis

RPJMD Kabupaten Pacitan, membutuhkan pendekatan lintas sektor yang menyinergikan infrastruktur air bersih, mitigasi risiko bencana, dan penguatan produktivitas sektor unggulan. Intervensi yang bersifat holistik akan menciptakan ekosistem ekonomi daerah yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Isu strategis penguatan ekonomi daerah melalui pariwisata dan sektor unggulan sangat relevan untuk dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan akses air bersih, penguatan ketahanan pangan, dan mitigasi bencana di tingkat kecamatan.

2.2.2.4.3 Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan prioritas strategis dalam dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pacitan. Isu kesejahteraan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan, tetapi juga melalui pemenuhan hak dasar seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, listrik, jaminan sosial, layanan pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan sosial. Dalam konteks Kabupaten Pacitan, tantangan utamanya adalah tingginya angka kemiskinan struktural di beberapa kecamatan, disertai ketimpangan spasial dan terbatasnya infrastruktur layanan dasar. Kecamatan Tegalombo sebagai pusat administratif, layanan publik, dan perekonomian kabupaten memiliki capaian kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dibanding kecamatan lainnya. Namun, disparitas antar wilayah, khususnya antara desa dan kota, masih cukup signifikan, terutama di kecamatan dengan topografi sulit seperti Nawangan, Bandar, dan Pringkuku. Ketimpangan ini harus segera direspons melalui strategi pengurangan kemiskinan yang terintegrasi dan inklusif.

Permasalahan dan Urgensi

a. **Tingginya Angka Kemiskinan Multidimensional**

Meskipun angka kemiskinan Kabupaten Pacitan mengalami tren penurunan, yakni dari 14,25% (2021) menjadi 13,37% (2023), namun angka tersebut masih jauh di atas rata-rata nasional

(9,36%) dan provinsi Jawa Timur (10,15%) (Sumber: BPS, *Pacitan Dalam Angka 2023*). Karakteristik kemiskinan di Pacitan bersifat multidimensi, di mana penduduk miskin juga mengalami kekurangan dalam akses layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.

- TPB 1.2.1: Sebagian besar kecamatan masih memiliki angka penduduk di bawah garis kemiskinan >12%.
- TPB 1.3.1: Cakupan jaminan sosial masih belum menyentuh seluruh populasi rentan.
- TPB 1.4.1**:** Masih terdapat rumah tangga miskin yang tidak memiliki akses terhadap air layak, listrik PLN, dan sanitasi sehat.

b. Ketimpangan Akses Layanan Dasar

Kecamatan Tegalombo sebagai salah satu wilayah penting di Kabupaten Pacitan memiliki fasilitas publik dan infrastruktur dasar yang mulai berkembang. Namun demikian masih terdapat sejumlah keterbatasan akses yang perlu mendapakan perhatian antara lain:

a. Jaringan listrik PLN belum menjangkau seluruh wilayah perbukitan dan pinggiran (Dinas ESDM Jatim, 2023).
b. Cakupan layanan air bersih dari PDAM baru mencapai ± 70% dari target pelayanan (PDAM Pacitan, 2023).
c. Akses sanitasi layak dan limbah rumah tangga yang belum tertangani masih terjadi di lebih dari 1/3 desa di Kabupaten Pacitan (BPS, 2023).

c. Kerentanan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Miskin

Kondisi geografis yang sulit serta keterbatasan infrastruktur membuat masyarakat miskin menjadi lebih rentan terhadap; risiko kesehatan dan gizi buruk, isolasi ekonomi dan pasar, ketidakmampuan mengakses program bantuan karena keterbatasan informasi dan mobilitas, dampak bencana alam dan perubahan iklim.

Meskipun terletak di ujung Kabupaten Pacitan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten lain, **Kecamatan Tegalombo** memiliki posisi strategis sebagai gerbang wilayah timur Pacitan. Keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai pintu masuk antar daerah, tetapi juga sebagai simpul penghubung mobilitas barang, jasa, dan masyarakat. Dengan dukungan fasilitas layanan dasar seperti Puskesmas, sekolah menengah, pasar, serta infrastruktur sosial lainnya, Tegalombo berperan penting sebagai pusat pelayanan bagi desa-desa sekitarnya sekaligus melayani masyarakat lintas batas.

Posisi perbatasan ini membuka peluang bagi Tegalombo untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mengurangi ketimpangan antar wilayah. Kolaborasi dengan daerah tetangga, penguatan potensi UMKM, serta peningkatan aksesibilitas menjadi kunci untuk menjadikan Tegalombo sebagai wilayah perbatasan yang tidak tertinggal, melainkan strategis dan mampu berkontribusi dalam pembangunan Kabupaten Pacitan secara menyeluruh.

2.2.2.4.4 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, dan partisipatif. Di Kabupaten Pacitan, reformasi tata kelola publik masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya di level kecamatan dan desa. Implementasi SPM belum merata, pemanfaatan e-procurement dan e-government masih terbatas, serta kapasitas SDM penyelenggara pemerintahan di tingkat lokal belum sepenuhnya memadai. Selain itu, sektor ekonomi daerah yang belum terkelola dengan baik akibat lemahnya perencanaan partisipatif dan pemanfaatan data berbasis wilayah, juga memperburuk efektivitas program-program pemberdayaan masyarakat.

Permasalahan dan Urgensi

Tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan di Kabupaten Pacitan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu segera diatasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel, efisien, dan responsif. Salah satu kendala utama adalah lemahnya implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021. Belum seluruh kecamatan mampu menyusun dan melaporkan capaian SPM secara sistematis, yang berdampak pada tidak optimalnya pengukuran kualitas layanan dasar kepada masyarakat. Selain itu, rendahnya akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa juga menjadi perhatian, di mana sistem e-Procurement belum sepenuhnya diadopsi di tingkat kecamatan maupun desa, sehingga masih terdapat potensi inefisiensi dan kurangnya transparansi.

Manajemen keuangan dan pelayanan berbasis kinerja juga menunjukkan kelemahan signifikan. Berdasarkan hasil evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2023, banyak unit kecamatan di Pacitan yang belum memiliki sistem pelaporan kinerja berbasis outcome. Hal ini menghambat upaya penilaian efektivitas program serta akuntabilitas pemanfaatan anggaran publik. Tantangan lainnya adalah keterbatasan akses dan literasi digital di kalangan aparatur kecamatan, yang berdampak pada lambatnya transformasi layanan publik berbasis elektronik dan menghambat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Namun demikian, Kecamatan Tegalombo sebagai wilayah administratif utama memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam reformasi tata kelola lokal. Kecamatan ini dapat menginisiasi penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) melalui pelatihan rutin mengenai tata kelola SPM, perencanaan partisipatif, dan pengelolaan keuangan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Pelaksanaan pilot project e-SPM dan e-Monev yang

dikembangkan dalam bentuk dashboard kecamatan juga dapat menjadi model yang direplikasi di kecamatan lainnya. Upaya digitalisasi pelayanan publik dapat dilakukan melalui pengembangan aplikasi layanan kecamatan, sistem pengaduan daring, serta peningkatan keterbukaan informasi publik. Selain itu, penguatan partisipasi masyarakat melalui Forum Kecamatan yang inklusif juga penting untuk mendorong Musrenbang yang melibatkan kelompok rentan, pelaku UMKM, dan unsur akademisi secara aktif.

Dengan demikian, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan perlu dimulai dari kecamatan sebagai unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Pacitan didorong untuk menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja di seluruh kecamatan, mendorong digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Pembentukan model Kecamatan Inklusif dan Tanggap Digital akan menjadi langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan partisipatif. Keberhasilan ini tentu memerlukan kolaborasi lintas sektor dalam hal pembinaan, supervisi, dan monitoring kinerja kecamatan secara berbasis data yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.2.2.5 Potensi Daerah

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, potensi daerah menjadi salah satu sumber utama dalam perumusan isu strategis. Pemanfaatan potensi daerah secara optimal tidak hanya mendukung percepatan pembangunan, tetapi juga mendorong kemandirian dan daya saing daerah. Oleh karena itu, potensi unggulan daerah perlu diidentifikasi sebagai isu strategis yang dapat diarahkan menjadi kekuatan pembangunan. Adapun potensi daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tegalombo antara lain:

1. Potensi produk unggulan lokal
2. Potensi sektor pariwisata
3. Potensi sumber daya alam

2.2.2.6 Isu Strategis Kecamatan Tegalombo 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari hasil telaah terhadap berbagai sumber yang telah dijelaskan, perlu dilakukan integrasi untuk mengidentifikasi isu strategis perangkat daerah secara komprehensif. Proses integrasi ini mencakup isu global, potensi daerah, permasalahan pelayanan, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, KLHS RPJMD, RPJMD Kabupaten Pacitan dan dokumen perencanaan lainnya. Rincian hasil integrasi tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.8 Perumusan Isu Kecamatan Tegalombo

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum berjalan secara optimal	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan		Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Penguatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan
	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel					Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan
	Gangguan ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan		Pengelolaan sampah padat perkotaan			Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
	Akses layanan publik belum merata	Pemerataan Akses dan Pelayanan Kesehatan				Pemerataan akses dan kualitas layanan publik
	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Peningkatan Infrastruktur Daerah		Permukiman di Area pegunungan Terdampak tanah longsor		Peningkatan infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana
	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah				Terciptanya Masyarakat yang Berkualitas, Unggul, dan Berbudaya	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Kemiskinan dan Pemenuhan Hak Dasar Penduduk Miskin		Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Masyarakat	Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
	Ketahanan air bersih	Peningkatan Kualitas Air Sungai dan Ketersediaan Air	Kelangkaan Air	Ketersediaan Air		Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum
		Optimalisasi Partisipasi Sekolah dan Pemenuhan Fasilitas Pendidikan				
					Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pariwisata dan Sektor Unggulan Daerah	

Sumber: Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan, 2025

Berdasarkan hasil integrasi berbagai sumber perumusan isu strategis, sebagaimana ditampilkan dalam tabel sebelumnya, telah teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama Kecamatan Tegalombo. Isu-isu tersebut merepresentasikan kondisi aktual yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kinerja, penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta pemenuhan mandat Kecamatan Tegalombo. Isu strategis ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam perumusan arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan Kecamatan Tegalombo. Uraian lebih lanjut mengenai isu strategis Kecamatan Tegalombo disajikan sebagai berikut:

1. Penguatan tata kelola pemerintahan desa
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kegiatan
3. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan
4. Pemerataan akses dan kualitas layanan publik
5. Peningkatan infrastruktur dasar berbasis mitigasi bencana
6. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
7. Penguatan koordinasi program kesejahteraan sosial terpadu
8. Penguatan ketahanan air bersih dan layanan air minum

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut terkait isu strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan:

1. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Kelurahan

Pemerintahan desa dan kelurahan sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat bawah masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas kelembagaan dan efektivitas operasional. Kurangnya sinergi antara aparatur serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menjadi hambatan utama dalam tata kelola yang akuntabel dan responsif. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan tata kelola melalui pelatihan aparatur, pemutakhiran data

kependudukan, serta penerapan sistem pemerintahan berbasis digital untuk mendorong efisiensi dan transparansi.

2. **Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan**

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kecamatan Tegalombo masih tergolong rendah. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya rasa memiliki terhadap program pembangunan dan minimnya pengawasan sosial. Oleh karena itu, perlu dibangun mekanisme partisipatif yang inklusif seperti musyawarah warga, forum konsultasi publik, dan peningkatan literasi pembangunan agar masyarakat aktif berkontribusi dalam menentukan arah pembangunan daerah.

3. **Penguatan Koordinasi Program Kesejahteraan Sosial Terpadu**

Banyaknya program kesejahteraan sosial dari berbagai sektor belum sepenuhnya berjalan secara terkoordinasi, menyebabkan tumpang tindih, inefisiensi, dan kurang tepat sasaran. Isu kemiskinan dan pemenuhan hak dasar warga miskin masih menjadi tantangan yang mendesak. Untuk itu, dibutuhkan sistem koordinasi lintas sektor dan pendataan terpadu berbasis satu data untuk memastikan program sosial menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan secara tepat, efisien, dan berkelanjutan.

4. **Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan Lingkungan**

Gangguan terhadap ketertiban umum, kenyamanan lingkungan, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga menjadi persoalan serius yang berdampak pada kualitas hidup warga. Penguatan peran Satpol PP, pengawasan lingkungan, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan keamanan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman. Kampanye kesadaran serta penerapan penegakan peraturan daerah perlu diperkuat secara konsisten.

5. **Pemerataan Akses dan Kualitas Layanan Publik**

Masih terdapat ketimpangan dalam akses dan kualitas pelayanan publik, khususnya di wilayah-wilayah terpencil atau kurang berkembang. Hal ini mencakup layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta layanan dasar lainnya. Upaya pemerataan layanan perlu dilakukan dengan memperkuat kapasitas aparatur, memperluas jangkauan infrastruktur pelayanan, serta digitalisasi pelayanan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hak yang sama secara adil.

6. **Peningkatan Infrastruktur Dasar Berbasis Mitigasi Bencana**

Kecamatan Tegalombo yang terletak di kawasan rawan bencana seperti gempa bumi, longsor, dan banjir memerlukan pendekatan infrastruktur yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan aspek ketangguhan dan kesiapsiagaan. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan fasilitas publik perlu dibangun dan dipelihara dengan mempertimbangkan risiko bencana serta adaptasi terhadap perubahan iklim agar pembangunan tetap berkelanjutan.

7. **Penguatan Ketahanan Air Bersih dan Layanan Air Minum**

Krisis air bersih yang kerap terjadi di musim kemarau menunjukkan pentingnya penguatan ketahanan air, baik dari segi ketersediaan maupun pengelolaan sumber daya air. Permasalahan ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Pengembangan sistem penampungan air hujan, perbaikan jaringan distribusi, serta edukasi penghematan air perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses air bersih secara merata dan berkelanjutan.

8. **Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kegiatan**

Tingkat penyerapan anggaran dan kualitas pengawasan kegiatan di Kecamatan Tegalombo masih membutuhkan perbaikan signifikan. Rendahnya akuntabilitas berisiko pada pemborosan

anggaran dan ketidakefisienan program pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pelaporan real-time berbasis teknologi, serta peningkatan kapasitas pengawasan internal untuk memastikan bahwa setiap anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan transparan.

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Pacitan 2025-2029 yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

“PACITAN SEMAKIN SEJAHTERA BAHAGIA”

Adapun misi Kabupaten Pacitan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. **Pemberantasan Kemiskinan**

Misi ini merupakan misi utama untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yang menjadi fokus pemerintah ke

depan. Salah satu tugas pemerintah yang paling utama adalah membebaskan masyarakatnya daribelenggu kemiskinan, sehingga harkat dan martabat sebagai manusia semakin meningkat. Meskipun permasalahan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari perkembangan sebuah negara/daerah dan tidak mungkin akan terselesaikan semuanya, akan tetapi sudah menjadi hal yang wajib bahwa pemerintah harus hadir dan berpihak kepada masyarakat miskin, mengurangi apa yang menjadi beban hidup masyarakat serta memberikan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya.

2. **Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pacitan yang lebih unggul dan berdaya saing yang berpegang Teguh pada nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Misi ini pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas dan akses pendidikan serta kesehatan, tercukupinya kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, fasilitasi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta investasi bidang sumber daya manusia Iainnya. Diharapkan pada akhirnya kualitas dan daya saing masyarakat akan terus meningkat.

3. **Memajukan Pariwisata untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang inklusif (*inclusive growth*), yaitu yang melibatkan sebanyak mungkin penduduk dalam prosesnya. Tujuannya adalah untuk mempercepat penurunan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan serta memperkuat kapasitas keluarga dalam menghadapi berbagai guncangan.

Pengurangan kemiskinan tidak dapat sepenuhnya mengandalkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga

membutuhkan berbagai intervensi yang efektif. Pola pertumbuhan inklusif menuntut adanya intervensi pemerintah yang tepat dan bersifat afirmatif bagi kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan. Karena peningkatan kapasitas memerlukan waktu, maka program afirmatif perlu dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan sasaran yang terarah, jelas, dan tepat. Untuk itu, optimalisasi sektor pariwisata, sektor agraris, serta sektor-sektor strategis lainnya harus menjadi prioritas utama.

4. Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani

Pariwisata sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu menjadi katalis bagi perkembangan sektor-sektor lainnya. Posisi Pacitan sebagai bagian dari kawasan Gunung Sewu UNESCO Global Geopark merupakan salah satu modal dasar dalam pengembangan pariwisata daerah.

Sektor agraris, yang merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pacitan, perlu dimaksimalkan melalui pemetaan potensi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.

Peningkatan kerja sama investasi dengan berbagai pihak diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas akses lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Selain itu, pelaku usaha mikro, ekonomi kreatif, dan wirausahawan muda perlu terus difasilitasi agar dapat meningkatkan pendapatan dan daya saingnya.

Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berperan dalam mendukung misi 4, yakni **Memperkuat Birokrasi yang Profesional dan Melayani**, tujuan **Terciptanya Birokasi yang Profesional dan melayani**, dan sasaran **Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif** dari RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan Kecamatan Tegalombo yakni Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima, yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat

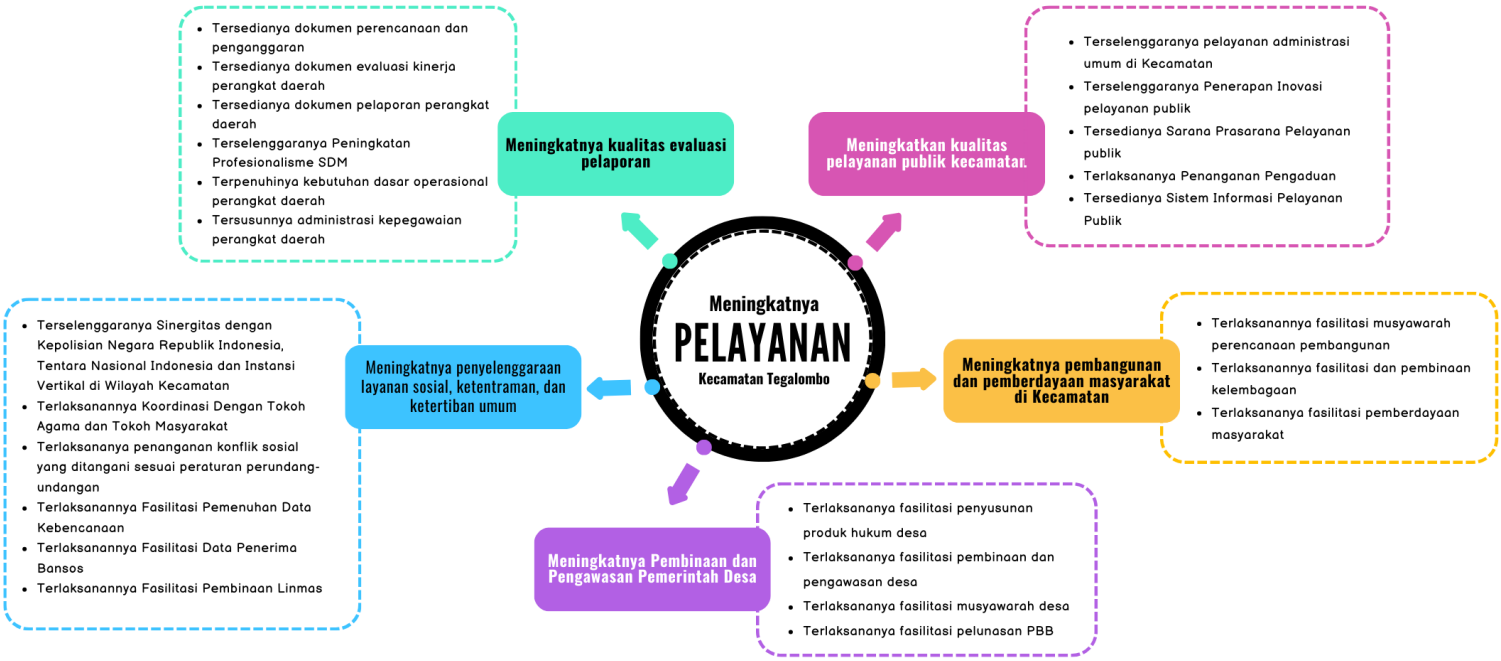
Daerah. Tujuan dan sasaran Kecamatan Tegalombo untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Tegalombo

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Sasaran: Terwujudnya Pelayanan Publik yang prima dan Inovatif **NSPK** 1. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan 4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima		Indeks Pelayanan Publik	3.31	3.35	3.4	3.45	3.50	3,55	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Tegalombo	Indeks Kepuasan Masyarakat	85.00	89.00	91.00	93.00	95.00	96.00	

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kec.Tegalombo Tahun 2025

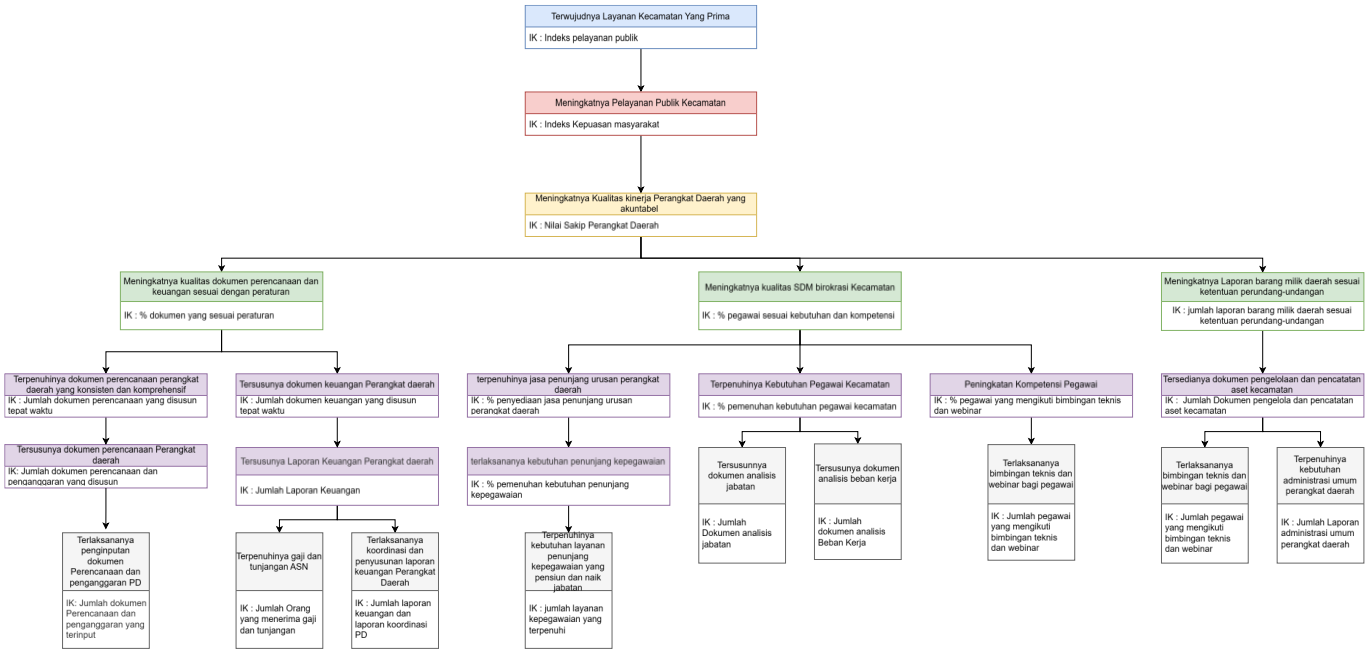
Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan *logical framework* dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai *logical framework* dan pohon kinerja Kecamatan Tegalombo, yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome, dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

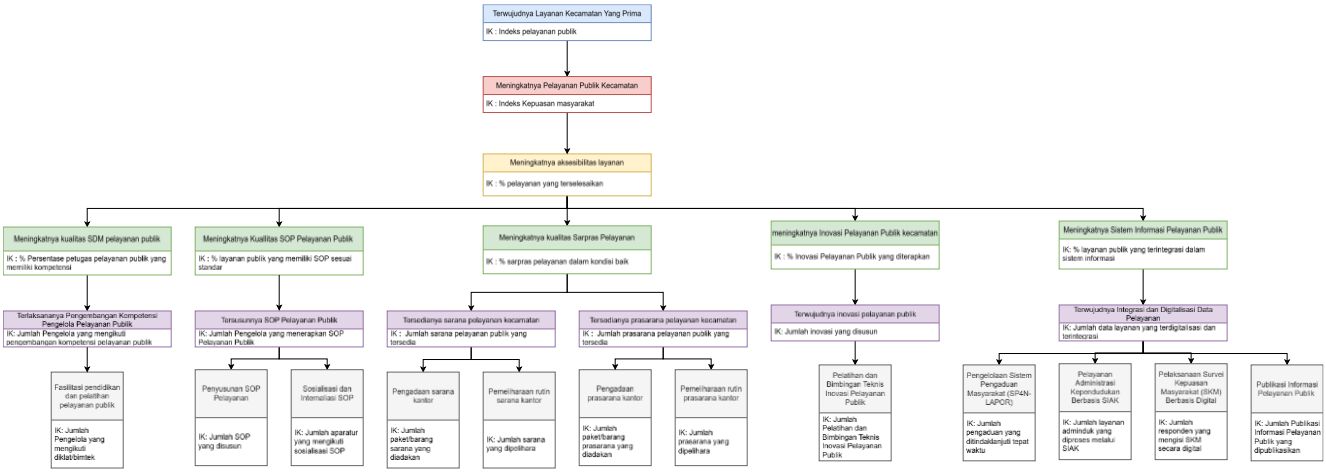


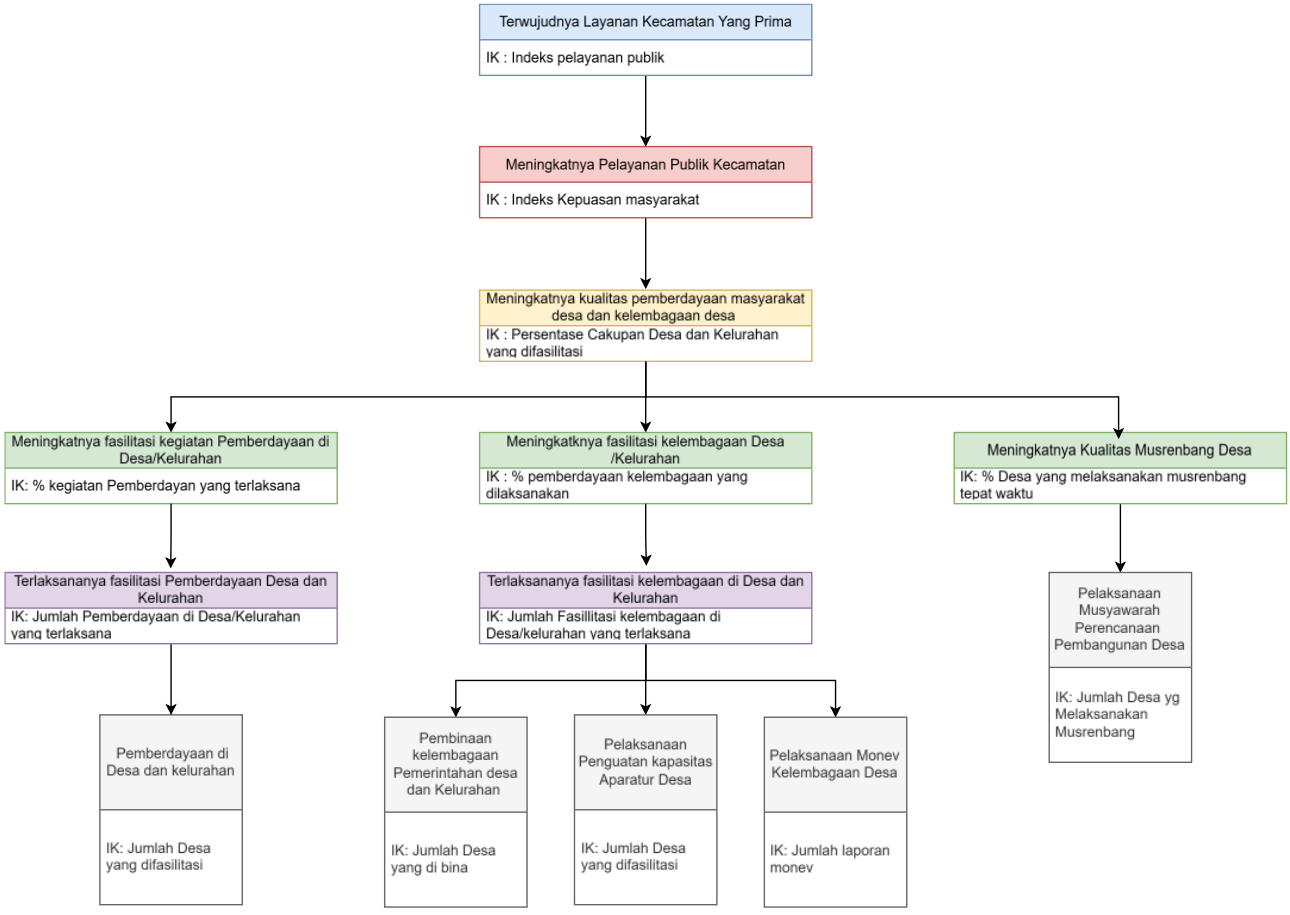
Gambar 3.1 Logical Framework Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

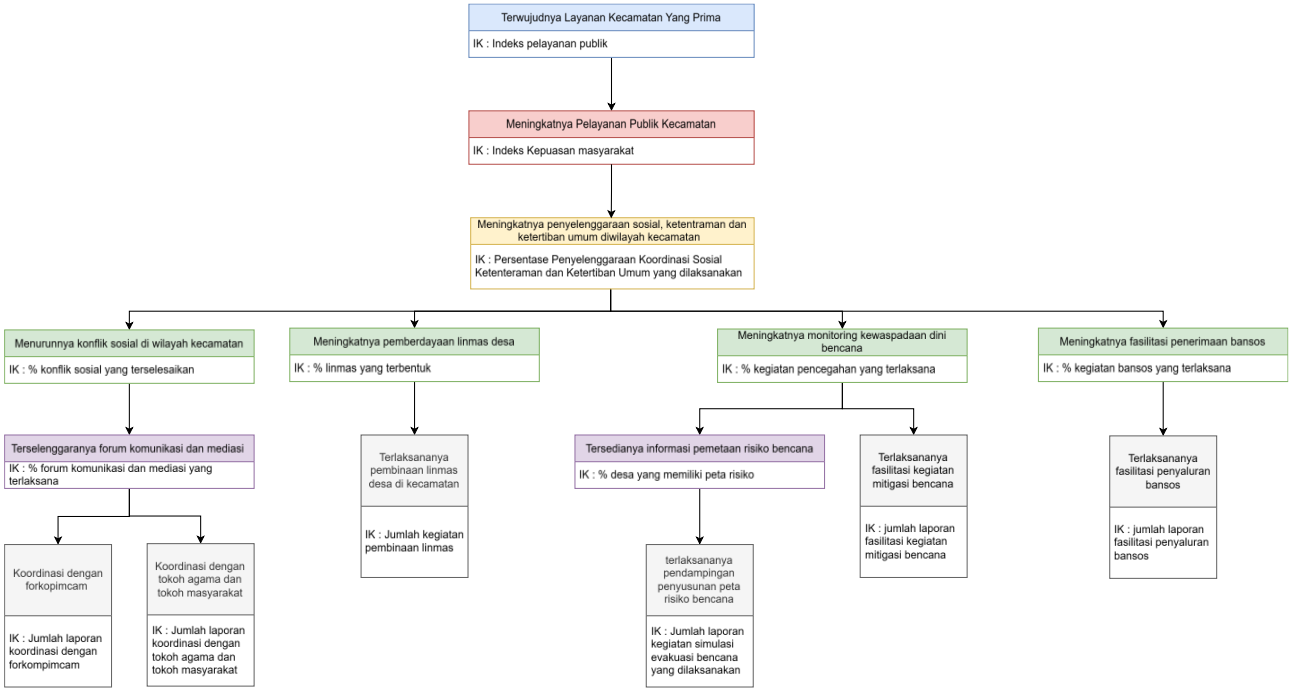
Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kec.Tegalombo Tahun 2025

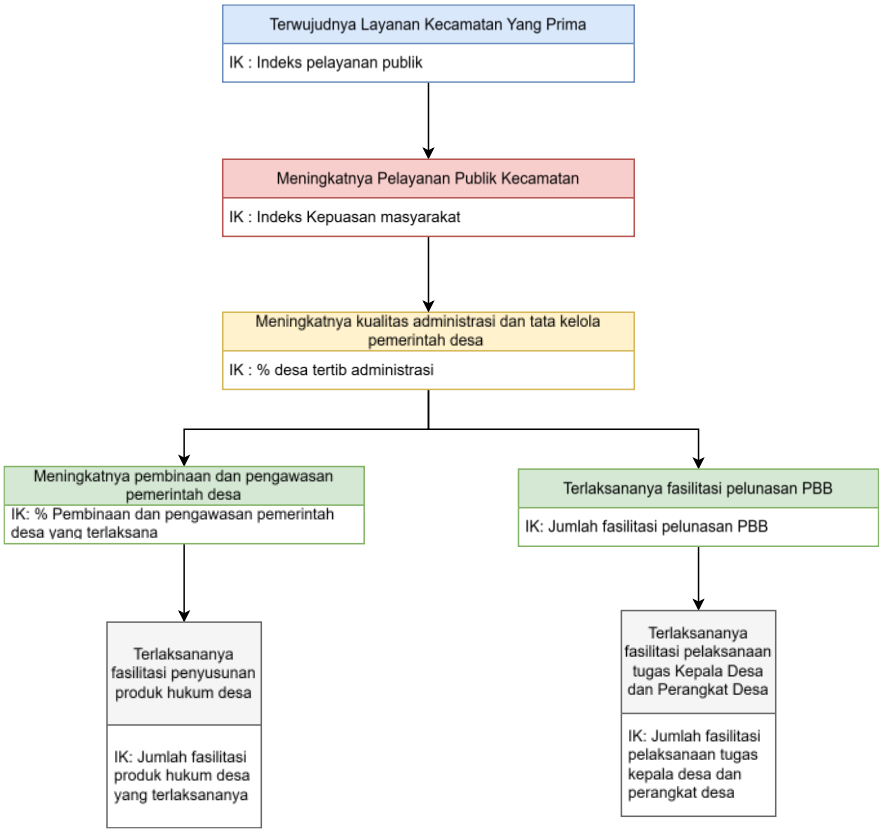
POHON KINERJA KECAMATAN TEGALOMBO




Terwujudnya Layanan Kecamatan Yang Prima
IK : Indeks pelayanan publik
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan
IK : Indeks Kepuasan masyarakat
Meningkatnya aksesibilitas layanan
IK : % pelayanan yang terselesaikan
Meningkatnya kualitas SDM pelayanan publik
IK : % Persentase petugas pelayanan publik yang memiliki kompetensi
Meningkatnya Kualitas SOP Pelayanan Publik
IK : % layanan publik yang memiliki SOP sesuai standar
Meningkatnya kualitas Sarpras Pelayanan
IK : % sarpras pelayanan dalam kondisi baik
meningkatnya Inovasi Pelayanan Publik kecamatan
IK : % Inovasi Pelayanan Publik yang diterapkan
Meningkatnya Sistem Informasi Pelayanan Publik
IK: % layanan publik yang terintegrasi dalam sistem informasi
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Pengelola Pelayanan Publik
IK: Jumlah Pengelola yang mengikuti pengembangan kompetensi pelayanan publik
Tersusunnya SOP Pelayanan Publik
IK: Jumlah Pengelola yang menerapkan SOP Pelayanan Publik
Tersedianya sarana pelayanan kecamatan
IK : Jumlah sarana pelayanan publik yang tersedia
Tersedianya prasarana pelayanan kecamatan
IK : Jumlah prasarana pelayanan publik yang tersedia
Terwujudnya inovasi pelayanan publik
IK: Jumlah inovasi yang disusun
Terwujudnya Integrasi dan Digitalisasi Data Pelayanan
IK: Jumlah data layanan yang terdigitalisasi dan terintegrasi
Fasilitasi pendidikan dan pelatihan pelayanan publik
IK: Jumlah Pengelola yang mengikuti diklat/bimtek
Penyusunan SOP Pelayanan
IK: Jumlah SOP yang disusun
Sosialisasi dan Internalisasi SOP
IK: Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi SOP
Pengadaan sarana kantor
IK: Jumlah paket/barang sarana yang diadakan
Pemeliharaan rutin sarana kantor
IK: Jumlah sarana yang dipelihara
Pengadaan prasarana kantor
IK: Jumlah paket/barang prasarana yang diadakan
Pemeliharaan rutin prasarana kantor
IK: Jumlah prasarana yang dipelihara
Pelatihan dan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik
IK: Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik
Pengelolaan Sistem Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR)
IK: Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti tepat waktu
Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis SIAK
IK: Jumlah layanan adminduk yang diproses melalui SIAK
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Berbasis Digital
IK: Jumlah responden yang mengisi SKM secara digital
Publikasi Informasi Pelayanan Publik
IK: Jumlah Publikasi Informasi Pelayanan Publik yang dipublikasikan


Terwujudnya Layanan Kecamatan Yang Prima
IK : Indeks pelayanan publik
Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan
IK : Indeks Kepuasan masyarakat
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa
IK : Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang difasilitasi
Meningkatnya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan di Desa/Kelurahan
IK: % kegiatan Pemberdayan yang terlaksana
Meningkatknya fasilitasi kelembagaan Desa /Kelurahan
IK : % pemberdayaan kelembagaan yang dilaksanakan
Meningkatnya Kualitas Musrenbang Desa
IK: % Desa yang melaksanakan musrenbang tepat waktu
Terlaksananya fasilitasi Pemberdayaan Desa dan Kelurahan
IK: Jumlah Pemberdayaan di Desa/Kelurahan yang terlaksana
Terlaksananya fasilitasi kelembagaan di Desa dan Kelurahan
IK: Jumlah Fasillitasi kelembagaan di Desa/kelurahan yang terlaksana
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
IK: Jumlah Desa yg Melaksanakan Musrenbang
Pemberdayaan di Desa dan kelurahan
IK: Jumlah Desa yang difasilitasi
Pembinaan kelembagaan Pemerintahan desa dan Kelurahan
IK: Jumlah Desa yang di bina
Pelaksanaan Penguatan kapasitas Aparatur Desa
IK: Jumlah Desa yang difasilitasi
Pelaksanaan Monev Kelembagaan Desa
IK: Jumlah laporan monev





Gambar 3.2 Pohon Kinerja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kec.Tegalombo Tahun 2025

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.2.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus, serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Berikut ini adalah proses perumusan strategi Kecamatan Tegalombo, yang meliputi:

Tabel 3.2 Penentuan Strategi Kecamatan Tegalombo

No	Masalah	Tujuan/Sasaran	Rumusan Strategi
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan belum berjalan secara optimal	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang profesional	1. Penguatan kapasitas aparatur desa/kelurahan 2. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pemerintahan
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan masih rendah	Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan	1. Penguatan forum musyawarah desa/kelurahan 2. Edukasi publik dan pelibatan komunitas lokal
3	Koordinasi dan keselarasan program kesejahteraan sosial belum terpadu	Mewujudkan integrasi program kesejahteraan sosial yang tepat sasaran	1. Sinkronisasi program antar lembaga/instansi 2. Pemutakhiran data sasaran penerima manfaat
4	Gangguan Ketentraman ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Meningkatkan keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan	1. Revitalisasi peran Linmas dan Satgas Keamanan 2. Edukasi dan pelibatan warga dalam sistem keamanan
5	Akses layanan publik belum merata	Memperluas jangkauan dan kualitas layanan publik dasar	1. Penguatan pelayanan berbasis digital 2. Pembukaan layanan publik di wilayah terisolasi
6	Infrastruktur dasar di wilayah kecamatan masih kurang memadai	Tersedianya infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga	1. Perencanaan pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan masyarakat 2. Pemanfaatan dana desa/Kecamatan

7	Ketahanan air bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih secara berkelanjutan	1. Pembangunan dan rehabilitasi sarana air bersih 2. Edukasi pengelolaan dan konservasi air
8	Penyerapan anggaran dan pengawasan kegiatan belum akuntabel	Meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran dan transparansi pelaksanaan program	1. Penguatan sistem pelaporan dan evaluasi berbasis kinerja 2. Peningkatan kapasitas pengawasan internal

Sumber: Hasil Pengolahan Data/ Analisis Kec.Tegalombo Tahun 2025

Tabel 3.2 merepresentasikan upaya strategis Kecamatan Tegalombo dalam merespons secara menyeluruh berbagai tantangan pembangunan lokal. Permasalahan yang diidentifikasi mencakup aspek pemerintahan, partisipasi masyarakat, koordinasi program sosial, ketertiban umum, layanan publik, infrastruktur dasar, ketahanan air bersih, hingga akuntabilitas anggaran. Setiap isu dirumuskan dengan tujuan yang jelas dan strategi yang saling melengkapi, seperti penguatan kapasitas aparatur, edukasi dan pelibatan warga, integrasi lintas sektor, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Pendekatan yang digunakan mencerminkan prinsip tata kelola yang partisipatif, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan strategi yang tersusun tidak hanya bersifat reaktif terhadap masalah, tetapi juga proaktif dalam mendorong perbaikan sistemik dan berkelanjutan di tingkat kecamatan.

3.1.1 Arah Kebijakan Perangkat daerah

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah. Kecamatan Tegalombo memiliki arah kebijakan yang selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Tegalombo

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**NSPK** 1. Mengordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 2. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum 3. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan 4. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;	Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan yang efektif dan transparan	Lemahnya kapasitas aparatur dan minimnya sistem evaluasi kinerja pemerintahan	Penguatan kapasitas SDM dan sistem manajemen kinerja pemerintahan desa/kelurahan	
2		Pemberdayaan terhadap pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa dan kecamatan	Rendahnya kesadaran masyarakat dan minimnya wadah partisipasi publik	Pemberdayaan masyarakat melalui forum musyawarah dan pemberian ruang aspirasi publik	
3		Perluasan penyediaan bantuan sosial peningkatan ketahanan pangan terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masayarakat Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Memperkuat koordinasi dan integrasi program kesejahteraan sosial	Tidak sinkronnya data dan program kesejahteraan sosial antar lembaga	Penajaman perencanaan terpadu dan peningkatan akurasi data penerima manfaat	
4		Penguatan kapasitas masyarakat tangguh bencana	Meningkatkan stabilitas keamanan dan kenyamanan wilayah	Kurangnya pengawasan lingkungan dan lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan	Revitalisasi satuan keamanan lingkungan dan edukasi kesadaran hukum	
5		Percepatan digitalisasi layanan publik	Memperluas akses dan kualitas layanan publik dasar di seluruh wilayah	Tidak meratanya distribusi fasilitas dan layanan publik	Perluasan layanan publik berbasis teknologi dan peningkatan pelayanan di wilayah terpencil	
6		Meningkatnya akses terhadap infrastruktur dasar	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar wilayah	Infrastruktur rusak dan belum merata antardesa/kelurahan	Perencanaan pembangunan infrastruktur partisipatif dan berbasis prioritas masyarakat	
7			Meningkatkan ketahanan dan akses air bersih yang berkelanjutan	Krisis air bersih pada musim kemarau dan minimnya sistem konservasi air	Pengembangan sarana air bersih dan perlindungan sumber daya air	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi Renstra PD	Akar Masalah	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
8		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan efektivitas penyerapan anggaran dan pengawasan program	Kurangnya akuntabilitas pelaksanaan program dan lemahnya sistem pengawasan	Penguatan sistem evaluasi, transparansi pelaporan, dan pembinaan aparatur dalam pengelolaan	

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kec.Tegalombo Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, dirumuskan arah kebijakan dari akar-akar masalah yang ada di lapangan. Permasalahan seperti lemahnya kapasitas aparatur dan sistem evaluasi kinerja dijawab dengan arah kebijakan berupa penguatan SDM dan manajemen pemerintahan desa/kelurahan. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat mendorong lahirnya kebijakan pemberdayaan publik melalui forum musyawarah dan ruang aspirasi. Ketidaksinkronan data kesejahteraan sosial direspons dengan penajaman perencanaan terpadu dan peningkatan akurasi data. Kurangnya pengawasan lingkungan serta lemahnya sinergi antarpemangku kepentingan dijawab dengan revitalisasi satuan keamanan dan edukasi hukum. Tidak meratanya distribusi layanan publik ditindaklanjuti melalui digitalisasi dan perluasan jangkauan pelayanan. Infrastruktur yang rusak dan belum merata mendorong arah kebijakan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Krisis air bersih dijawab dengan pembangunan sarana dan perlindungan sumber daya air.

3.1.2 Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Gambaran penahapan pembangunan selama lima tahun ke depan disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang:

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Kecamatan Tegalombo

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Konsolidasi Tata Kelola dan Pemberdayaan Dasar • Tata Kelola Pemerintahan • Pemberdayaan Masyarakat • Pelayanan Publik Dasar • Ketertiban dan Ketahanan Sosial • Kesejahteraan Sosial • Infrastruktur Dasar	Penguatan Infrastruktur Pendukung Layanan dan Pemberdayaan • Infrastruktur Dasar • Pelayanan Publik • Pemberdayaan Masyarakat • Pemerintahan Efektif • Ketertiban dan Sosial	Transformasi Pelayanan dan Kemandirian Masyarakat • Pemerintahan Efektif • Pemberdayaan • Layanan Publik • Ketahanan Sosial • Kesejahteraan Sosial	Pemerataan Layanan dan Akselerasi Kesejahteraan • Pemerataan Layanan • Kesejahteraan • Infrastruktur • Pemberdayaan • Ketertiban Umum	Konsolidasi Capaian dan Daya Saing Wilayah • Pelayanan Prima • Pemberdayaan & Pariwisata • Tata Kelola • Daya Saing Wilayah • Ketahanan Sosial

Sumber: Hasil Pengolahan Data/Analisis Kec.Tegalombo Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 3.4, penahapan perencanaan strategis Kecamatan Tegalombo ditunjukkan secara berkelanjutan dan bertahap dari tahun 2025 hingga 2029. Setiap tahapan dirancang untuk menjawab tantangan nyata dengan fokus yang saling melengkapi. Tahap awal (2025) difokuskan pada konsolidasi dasar melalui penataan tata kelola, pemetaan kebutuhan masyarakat, serta pendataan sosial dan infrastruktur. Tahap kedua (2026) menekankan penguatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal. Memasuki tahap ketiga (2027), orientasi diarahkan pada transformasi layanan dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui BUMDes, digitalisasi, serta integrasi layanan publik. Tahap keempat (2028) fokus pada pemerataan layanan hingga wilayah rentan dan akselerasi kesejahteraan berbasis keluarga. Akhirnya, tahap kelima (2029) menitikberatkan pada konsolidasi capaian, inovasi pelayanan, dan peningkatan daya saing wilayah melalui integrasi sektor pemberdayaan, pariwisata, dan ketahanan sosial. Secara keseluruhan, tahapan ini mencerminkan strategi pembangunan yang progresif, adaptif, dan berbasis data, dengan orientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III dokumen Renstra ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Tegalombo disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Renstra Kecamatan Tegalombo mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan di Kecamatan Tegalombo, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Tegalombo							
- Terwujudnya Pelayanan Publik yang Prima dan Inovatif	Terwujudnya Layanan Kecamatan yang Prima				Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
		Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Tegalombo			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan	7.01.01.2.01 - Perencanaan,	

					RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	7.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD (Laporan)	7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	7.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya layanan kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	7.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Tersedianya barang milik daerah dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa		Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
					Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

				Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
			Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
				Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	7.01.05.2.01.0005 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	

			Meningkatnya kualitas administrasi dan tata kelola pemerintah desa		Persentase Desa yang Termonitoring (%)	7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.0002 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0005 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	

					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	7.01.06.2.01.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	7.01.06.2.01.0017 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari SIPD – Kemendagri RI, Kecamatan Tegalombo, Tahun 2025.

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, subkegiatan, serta pendanaannya:

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2026-2030

Kode	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Outcome/Output	Indikator	Target Kinerja dan Anggaran										OPD
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	Target Kinerja	Target Anggaran	
	KECAMATAN TEGALOMBO				**2.191.699.412,00**		**2.301.286.000,00**		**2.393.338.000,00**		**2.489.072.000,00**		**2.588.636.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Meningkatnya Kualitas kinerja Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)**	**73,00**	**1.891.702.770,00**	**73,50**	**1.986.288.000,00**	**74,00**	**2.065.740.000,00**	**74,50**	**2.148.370.000,00**	**75,00**	**2.234.305.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersusunnya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah**	**21**	**15.600.000,00**	**21**	**19.600.000,00**	**21**	**22.304.000,00**	**21**	**27.596.160,00**	**21**	**32.900.006,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	1.000.000,00	5	1.500.000,00	5	2.000.000,00	5	2.080.000,00	5	2.163.200,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.144.000,00	1	1.189.760,00	1	1.237.350,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	1	1.500.000,00	1	1.560.000,00	1	1.622.400,00	1	1.687.296,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.000.000,00	1	1.300.000,00	1	1.352.000,00	1	1.406.080,00	1	1.462.323,00	**Kecamatan Tegalombo**

7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1.500.000,00	1	1.200.000,00	1	1.248.000,00	1	1.297.920,00	1	1.349.837,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	12 Laporan	10.100.000,00	12 Laporan	13.000.000,00	12 Laporan	15.000.000,00	12 Laporan	20.000.000,00	12 Laporan	25.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah	59 Dokumen	1.588.674.803,00	59 Dokumen	1.607.038.000,00	59 Dokumen	1.613.166.480,00	59 Dokumen	1.616.439.059,00	59 Dokumen	1.619.794.222,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Administrasi Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	14 Dokumen	1.547.374.803,00	14 Dokumen	1.552.601.000,00	14 Dokumen	1.556.552.000,00	14 Dokumen	1.557.560.000,00	14 Dokumen	1.558.560.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12 Dokumen	35.100.000,00	12 Dokumen	45.000.000,00	12 Dokumen	46.800.000,00	12 Dokumen	48.672.000,00	12 Dokumen	50.618.880,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6 Laporan	2.000.000,00	6 Laporan	3.000.000,00	6 Laporan	3.120.000,00	6 Laporan	3.244.800,00	6 Laporan	3.374.592,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	6 Dokumen	2.000.000,00	6 Dokumen	3.000.000,00	6 Dokumen	3.120.000,00	6 Dokumen	3.244.800,00	6 Dokumen	3.374.592,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18 Laporan	2.200.000,00	18 Laporan	3.437.000,00	18 Laporan	3.574.480,00	18 Laporan	3.717.459,00	18 Laporan	3.866.158,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen Laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**Jumlah Dokumen laporan barang milik daerah sesuai ketentuan perundangan**	**12 Laporan**	**2.600.000,00**	**12 Laporan**	**2.650.000,00**	**12 Laporan**	**2.756.000,00**	**12 Laporan**	**2.866.240,00**	**12 Laporan**	**2.980.890,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12 Laporan	2.600.000,00	12 Laporan	2.650.000,00	12 Laporan	2.756.000,00	12 Laporan	2.866.240,00	12 Laporan	2.980.890,00	**Kecamatan Tegalombo**

7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Terpenuhinya layanan kepegawaian**	**Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian**	**100%**	**15.000.000,00**	**100%**	**15.200.000,00**	**100%**	**15.808.000,00**	**100%**	**16.440.320,00**	**100%**	**18.629.882,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	19 Paket	15.000.000,00	19 Paket	15.200.000,00	19 Paket	15.808.000,00	19 Paket	16.440.320,00	19 Paket	18.629.882,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar perangkat daerah	Prosentase operasional dasar perangkat daerah yang dipenuhi	**100 %**	**128.200.000,00**	**100 %**	**135.800.000,00**	**100 %**	**160.000.000,00**	**100 %**	**183.828.221,00**	**100 %**	**220.000.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	40.000.000,00	12 Paket	40.100.000,00	12 Paket	45.000.000,00	12 Paket	50.000.000,00	12 Paket	70.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	12 Paket	50.000.000,00	12 Paket	40.150.000,00	12 Paket	50.000.000,00	12 Paket	63.828.221,00	12 Paket	70.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	38.200.000,00	12 Laporan	55.550.000,00	12 Laporan	65.000.000,00	12 Laporan	70.000.000,00	12 Laporan	80.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tersedianya Barang Milik Daerah penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah**	**Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan**	**12 Unit**	**25.000.000,00**	**12 Unit**	**40.000.000,00**	**12 Unit**	**61.705.520,00**	**12 Unit**	**80.000.000,00**	**12 Unit**	**90.000.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	12 Unit	25.000.000,00	12 Unit	40.000.000,00	12 Unit	61.705.520,00	12 Unit	80.000.000,00	12 Unit	90.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpenuhinya kebutuhan operasional dasar perangkat daerah**	**Presentase penyediaan jasa penunjang operasional**	**100%**	**104.627.967,00**	**100%**	**110.500.000,00**	**100%**	**120.000.000,00**	**100%**	**126.200.000,00**	**100%**	**135.000.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	25.327.967,00	12 Laporan	25.500.000,00	12 Laporan	30.000.000,00	12 Laporan	31.200.000,00	12 Laporan	35.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12 Laporan	79.300.000,00	12 Laporan	85.000.000,00	12 Laporan	90.000.000,00	12 Laporan	95.000.000,00	12 Laporan	100.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tersedianya barang milik daerah dalam kondisi baik**	Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	**100%**	**12.000.000,00**	**100%**	**55.500.000,00**	**100%**	**70.000.000,00**	**100%**	**95.000.000,00**	**100%**	**115.000.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**

7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12 Unit	5.000.000,00	12 Unit	5.500.000,00	12 Unit	10.000.000,00	12 Unit	20.000.000,00	12 Unit	35.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5 Unit	7.000.000,00	5 Unit	50.000.000,00	5 Unit	60.000.000,00	5 Unit	75.000.000,00	5 Unit	80.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik**	**Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Dilaksanakan (%)**	**100%**	**72.997.000,00**	**100%**	**76.647.000,00**	**100%**	**79.713.000,00**	**100%**	**82.902.000,00**	**100%**	**86.218.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan**	Pemenuhan layanan administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	**100%**	**72.997.000,00**	**100%**	**76.647.000,00**	**100%**	**79.713.000,00**	**100%**	**82.902.000,00**	**100%**	**86.218.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	72.997.000,00	12 Laporan	76.647.000,00	12 Laporan	79.713.000,00	12 Laporan	82.902.000,00	12 Laporan	86.218.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa	Persentase Cakupan Desa dan Kelurahan yang Difasilitasi (%)	**100%**	**47.237.642,00**	**100%**	**49.600.000,00**	**100%**	**51.584.000,00**	**100%**	**53.647.000,00**	**100%**	**55.793.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Terlaksananya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**	Jumlah Desa Yang di fasilitasi	**11 Desa**	**47.237.642,00**	**11 Desa**	**49.600.000,00**	**11 Desa**	**51.584.000,00**	**11 Desa**	**53.647.000,00**	**11 Desa**	**55.793.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	31 Dokumen	20.000.000,00	31 Dokumen	21.000.000,00	31 Dokumen	21.841.000,00	31 Dokumen	22.713.000,00	31 Dokumen	23.622.000,00	**Kecamatan Tegalombo**

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	27.237.642,00	12 Laporan	28.600.000,00	12 Laporan	29.743.000,00	12 Laporan	30.934.000,00	12 Laporan	32.171.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	**100%**	**94.695.000,00**	**100%**	**99.430.000,00**	**100%**	**103.407.000,00**	**100%**	**107.543.000,00**	**100%**	**111.845.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Terlaksananya koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum**	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**100%**	**94.695.000,00**	**100%**	**99.430.000,00**	**100%**	**103.407.000,00**	**100%**	**107.543.000,00**	**100%**	**111.845.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12 Laporan	44.695.000,00	12 Laporan	46.430.000,00	12 Laporan	47.407.000,00	12 Laporan	48.543.000,00	12 Laporan	50.845.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	12 LAporan	50.000.000,00	12 LAporan	53.000.000,00	12 LAporan	56.000.000,00	12 LAporan	59.000.000,00	12 LAporan	61.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan (%)	**100%**	**19.477.000,00**	**100%**	**20.451.000,00**	**100%**	**21.269.000,00**	**100%**	**22.120.000,00**	**100%**	**23.005.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Terlaksananya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah**	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	**11 Desa**	**19.477.000,00**	**11 Desa**	**20.451.000,00**	**11 Desa**	**21.269.000,00**	**11 Desa**	**22.120.000,00**	**11 Desa**	**23.005.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Laporan)	12 Laporan	10.477.000,00	12 Laporan	11.451.000,00	12 Laporan	11.500.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	12.500.000,00	**Kecamatan Tegalombo**

7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	12 Dokumen	9.000.000,00	12 Dokumen	9.000.000,00	12 Dokumen	9.769.000,00	12 Dokumen	10.120.000,00	12 Dokumen	10.505.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Meningkatnya kualitas administrasi dan tata kelola pemerintah desa	Persentase Desa yang Termonitoring (%)	**100%**	**65.590.000,00**	**100%**	**68.870.000,00**	**100%**	**71.625.000,00**	**100%**	**74.490.000,00**	**100%**	**77.470.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Terlaksananya fasilitasi, rekomendasi, koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**Jumlah Desa yang termonitoring**	**11 Desa**	**65.590.000,00**	**11 Desa**	**68.870.000,00**	**11 Desa**	**71.625.000,00**	**11 Desa**	**74.490.000,00**	**11 Desa**	**77.470.000,00**	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	66 Dokumen	19.000.000,00	66 Dokumen	17.000.000,00	66 Dokumen	18.000.000,00	66 Dokumen	19.000.000,00	66 Dokumen	20.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	12 Dokumen	15.590.000,00	12 Dokumen	16.370.000,00	12 Dokumen	16.000.000,00	12 Dokumen	16.000.000,00	12 Dokumen	16.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa (Dokumen)	5 Dokumen	10.000.000,00	5 Dokumen	12.000.000,00	5 Dokumen	13.000.000,00	5 Dokumen	14.000.000,00	5 Dokumen	15.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	2 Dokumen	11.000.000,00	2 Dokumen	12.250.000,00	2 Dokumen	12.625.000,00	2 Dokumen	13.000.000,00	2 Dokumen	13.470.000,00	**Kecamatan Tegalombo**
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya (Laporan)	12 Laporan	10.000.000,00	12 Laporan	11.250.000,00	12 Laporan	12.000.000,00	12 Laporan	12.490.000,00	12 Laporan	13.000.000,00	**Kecamatan Tegalombo**

Sumber: RPJMD Kabupaten Pacitan 2025-2029

Program dan target pada tahun 2030 disusun sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Tegalombo. Penyusunan program ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tegalombo periode selanjutnya, sehingga seluruh arah kebijakan dan kegiatan yang dirancang tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Dengan demikian, kesinambungan antara dokumen perencanaan akan terjaga secara sistematis dan konsisten, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan.

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan subkegiatan dalam Dokumen Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta subkegiatan yang akan secara langsung mendukung pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi *outcome* yang terukur dan terarah.

Program tahun 2030 disusun sebagai bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Kecamatan Tegalombo. Penyusunan program ini menjadi pijakan strategis dalam merumuskan Renja Kecamatan Tegalombo tahun 2030, sehingga seluruh arah kebijakan dan kegiatan yang dirancang tetap selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang daerah. Dengan demikian, kesinambungan antara dokumen perencanaan akan terjaga secara

sistematis dan konsisten, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara berkelanjutan.

Tabel 4.3 Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
7.01.0.00.0.00.09.0000 - Kecamatan Tegalombo				
1.	7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	
			7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat desa dan kelembagaan desa	7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	
			7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	
			7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.	7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
			7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
			7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	

Sumber: Hasil Pengolahan Data dari SIPD – Kemendagri RI, Kecamatan Tegalombo, Tahun 2025.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan diukur melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Kecamatan Tegalombo.

4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tegalombo

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tegalombo	Nilai	3.31	3.35	3.40	3.45	3.50	3.55	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	89	91	93	95	96	

Sumber: Bappeda Kabupaten Pacitan dan Kecamatan Tegalombo, 2025

4.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun demikian, hingga saat ini Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan belum memiliki Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan secara khusus. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Tegalombo masih mengacu pada indikator umum penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam RPJMD Kabupaten Pacitan.

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

BAB V
PENUTUP



BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Renstra Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan berisi perencanaan yang merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan indikatif.

Renstra Kecamatan Tegalombo ini diharapkan dapat memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana kinerja, sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kecamatan Tegalombo. Pelaksanaan Renstra Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab institusinya.

Dengan dirumuskannya Renstra Kecamatan Tegalombo Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Kecamatan Tegalombo. Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Pacitan 2025-2029.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi

dalam pelaksanaan Renstra Kecamatan Tegalombo. Kaidah ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan Kecamatan Tegalombo berjalan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan Renstra Kecamatan Tegalombo Tahun 2025–2029 berjalan secara efektif, efisien, terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Pacitan Tahun 2025–2045 serta RPJMD Kabupaten Pacitan periode berjalan.
2. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja) Renstra dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara input, output, dan outcome.
3. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan menghindari tumpang tindih pelaksanaan.
4. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.
5. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini

dapat disesuaikan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

5.3 Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2025-2029 dilakukan untuk menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai yang berlaku.

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

